



WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR: 43 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KOTA BAUBAU TAHUN 2024- 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA,

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Baubau Tahun 2024–2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
9. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 11 Tahun 2013 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2013 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Baubau Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2023 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KOTA BAUBAU TAHUN 2024 – 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
7. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuh^{bi} kebutuhan dasar warga Negara.
9. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga Negara secara minimal.
10. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhan secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.

13. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan penerima jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negeri secara minimal.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah Kota Baubau untuk periode tahun 2024 -2026.
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode tahun 2024-2026.
17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II
TIM PENERAPAN, PENDATAAN, PEMUTAKHIRAN
DAN SINKRONISASI DATA

Pasal 2

- (1) Wali Kota menetapkan Tim Penerapan SPM dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.

Pasal 3

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik.
- (2) Pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah selaku sekretaris tim penerapan SPM dan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang terdiri dari :
 - a. jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar;
 - b. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia dan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia;
 - c. jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk format pengumpulan data terhadap urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Renaksi Penerapan SPM.
- (5) Pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui verifikasi data dari perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil selaku anggota tim penerapan SPM bersama dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.

BAB III INTEGRASI SPM

Pasal 4

- (1) Tim penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar memprioritaskan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemenuhan Pelayanan Dasar kedalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (3) Bappeda selaku Wakil Ketua Tim Penerapan SPM memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemenuhan Pelayanan Dasar terintegrasi kedalam dokumen RKPD dan Renja PD

Pasal 5

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM kedalam dokumen APBD.
- (2) Bappeda selaku Wakil Ketua Tim Penerapan SPM dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku anggota Tim Penerapan SPM memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemenuhan Pelayanan Dasar dalam Dokumen RKPD dan Renja PD terintegrasi kedalam APBD dan memastikan tercatat sampai kedalam dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.

BAB IV STRATEGI PENERAPAN SPM

Pasal 6

- (1) Tim penerapan SPM mengkoordinasikan perumusan strategi penerapan SPM dan melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM.
- (2) Bagian Pemerintahan selaku sekretaris tim penerapan SPM mengkoordinasikan perumusan strategi penerapan SPM dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.
- (3) Inspektorat selaku anggota tim penerapan SPM mengkoordinasikan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perumusan strategi penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
- (5) Tim penerapan SPM melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. pertemuan atau rapat koordinasi secara berkala setiap triwulan;
 - b. bimbingan teknis penerapan SPM;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. konsultasi penerapan SPM.
- (6) Langkah operasional dan strategi penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM;
 - c. BAB III : Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM;
 - d. BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM;

BAB V : Kesimpulan dan Saran.

- (7) Strategi dan pemenuhan penerapan SPM pada ayat (6) dituangkan dalam matriks renaksi penerapan SPM yang berupa :
- a. program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - b. indikator kinerja jenis pelayanan dasar terhadap penerima layanan dasar dan mutu layanan dasar yang terpenuhi;
 - c. tahun dasar pelaksanaan;
 - d. pencapaian SPM;
 - e. inisiasi;
 - f. sumber pendanaan; dan
 - g. instansi pelaksana.
- (8) Langkah operasional dan strategi penerapan SPM memuat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Tim penerapan SPM melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.
- (2) Sosialisasi penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyampaikan strategi dan rencana program kegiatan pemenuhan SPM pada tahun anggaran berjalan dan tahun berikutnya.
- (3) Sosialisasi penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bagian Pemerintahan selaku sekretariat tim penerapan SPM dan perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melalui pemanfaatan media lokal yang mudah diakses masyarakat dan forum-forum kemasyarakatan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Tim penerapan SPM melakukan koordinasi dan konsolidasi sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran daerah.
- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (3) Sekretaris Daerah selaku ketua tim penerapan SPM memprioritaskan pembiayaan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal APBD tidak mencukupi pembiayaan penerapan SPM, tim penerapan SPM mengupayakan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

- (5) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim penerapan SPM dapat mengupayakan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kerja sama dengan daerah lain, kerja sama dengan pihak ketiga, kerja sama dengan badan usaha, mengusulkan pembiayaan dari APBN dan upaya lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Tim penerapan SPM mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi penerapan SPM Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap triwulan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan penerapan SPM tahun berikutnya.

Pasal 10

- (1) Tim Penerapan SPM menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi.
- (2) Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM dan dikonsolidasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hubungan masyarakat dan dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 11

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pencapaian berdasarkan laporan penerapan SPM.
- (2) Bagian Pemerintahan selaku Sekretariat Tim Penerapan SPM melakukan analisis Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada triwulan empat.
- (3) Hasil analisis laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai rekomendasi kebijakan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 12

- (1) Bagian Pemerintahan selaku sekretariat tim penerapan SPM melaporkan penerapan SPM kepada sekretariat bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi <https://spm.banqda.kemendagri.go.id>
- (2) Laporan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara triwulan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

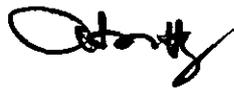
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 19 SEPTEMBER 2024
Pj. WALI KOTA BAUBAU,



MUH. RASMAN MANAFI

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 19 SEPTEMBER 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU



LA ODE ASWAD

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABGO TAPEN	
4.	KABGO HUKUM	
5.		

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2024 NOMOR 150

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR : 43 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BAUBAU TAHUN 2024-2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan karunia-Nya, dalam proses penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Baubau Tahun 2024-2026, dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah pada batas waktu yang ditentukan. Untuk memastikan pemenuhan layanan dasar secara minimal, Pemerintah Kota Baubau melakukan pemetaan untuk melihat sejauh mana jangkauan pelayanan minimal diterima oleh masyarakat. Hasil pemetaan persoalan dijadikan sebagai dasar bagi Pemerintah Kota Baubau untuk membuat desain perencanaan jangka menengah pencapaian SPM melalui Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan Renaksi Penerapan SPM ini terutama sthakholder yang terlibat langsung dalam penyusunan. Kami berharap Renaksi Penerapan SPM ini mampu memberikan perubahan dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah terutama dalam upaya meningkatkan kualitas dalam pemenuhan layanan dasar bagi Masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 11 ayat (3) yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Kemudian pada Pasal 18 mengamanatkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Atas ketentuan tersebut di atas, pada tahun 2018 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Lingkup standar pelayanan dasar meliputi 6 urusan wajib meliputi

- 1) Pendidikan
- 2) Kesehatan
- 3) Pekerjaan Umum
- 4) Perumahan Rakyat
- 5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, dan
- 6) Sosial.

Keenam urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketetapan tersebut, Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi unsur SPM pada urusan pembangunan tersebut dengan berpedoman pada standar teknis yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang membawahi urusan wajib pelayanan dasar tersebut. Secara umum standar teknis dalam penerapan SPM sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Percepatan penerapan dan pencapaian SPM dilatar belakangi karena penerapan pencapaian SPM belum optimal. Penerapan dan pencapaian SPM masih banyak menghadapi kendala yaitu masih terbatasnya pemahaman Pemerintah Daerah dalam menghitung target indikator SPM, belum disusunnya rencana pencapaian SPM beserta penganggarannya.

Dalam rangka perwujudan percepatan dan pencapaian SPM di daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana pada Pasal 21 ayat (2) menyebutkan Tim Penerapan SPM daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas diantaranya mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Bupati/Wali Kota.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah untuk menjadi acuan bagi Perangkat Daerah pengampu SPM dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Sementara itu tujuan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah sebagai berikut:

1. Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Kota Baubau.
2. Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran.

3. Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM.
4. Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun targetpencapaian SPM.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Baubau dalam mencapai sasaran yaitu meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik.

1.3 Kondisi Umum Daerah

1.3.1 Luas Wilayah dan Batas Wilayah

Secara astronomis, Kota Baubau terletak di bagian selatan garis khatulistiwa diantara 5.21° – 5.33° Lintang Selatan dan diantara 122.30° – 122.47° Bujur Timur. Berdasarkan letak geografis, Kota Baubau memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Buton;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Buton;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Buton Selatan.;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Selat Buton.

Luas Kota Baubau memiliki luas wilayah 294,98 Km² dengan luas masing-masing kecamatan sebagai berikut :

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)
1	Wolio	33,89
2	Betoambari	32,85
3	Sorawolio	111,76
4	Bungi	58,89
5	Kokalukuna	16,81
6	Murhum	6,13
7	Batupoaro	1,68
8	Lea-Lea	32,96

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, 2023.

1.3.2 Topografi

Wilayah Kota Baubau pada umumnya memiliki permukaan yang bergunung, bergelombang dan berbukit-bukit. Diantara gunung dan bukit-bukit terbentang dataran yang merupakan daerah potensial untuk mengembangkan sektor pertanian.

1.3.3 Hidrologi

Kota Baubau terdapat sebuah sungai yang besar yaitu sungai Baubau. Sungai tersebut melewati Kecamatan Wolio, Kecamatan Murhum dan Kecamatan Batupoaro dan memiliki potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber tenaga listrik, pertanian, perikanan, kebutuhan industri, kebutuhan rumah tangga dan pariwisata.

Penjelasan tentang kondisi air tanah Kota Baubau dibagi atas dua macam, yaitu :

- Air Tanah Dangkal

Air Tanah dangkal adalah air tanah yang diambil dari kedalaman dibawah 40 m dengan kondisi demikian maka kualitas air rentan terhadap pengaruh lingkungan sekitarnya yaitu disaat musim penghujan kuantitas relative banyak tetapi sebaliknya disaat musim kemarau air menjadi berkurang bahkan sampai kering. Dari sisi kualitas, air tanah dangkal banyak mengandung unsure kesadahan yang tinggi diakibatkan oleh adanya unsure-unsur seperti Mg^{+2} , Mn^{+2} , Ca^{+2} dan Fe^{+2} . Untuk pengambilan air baku ini memerlukan pengolahan penurunan kadar unsure-unsur tersebut diatas melalui proses kapus soda atau dengan pemanasan.

- Air Tanah Dalam

Air tanah dalam adalah air tanah yang diambil dari kedalaman diatas 40 m. Air tanah dalam memiliki kualitas yang relative bagus bahkan untuk daerah tertentu memiliki kualitas yang tidak memerlukan pengolahan terlebih dahulu untuk dipergunakan. Dari sisi kualitas air tanah dalam sudah sangat berkurang.

- Air Permukaan

Air Permukaan adalah air yang ada dipermukaan tanah seperti air sungai dan danau. Diwilayah perencanaan terdapat beberapa sumber air permukaan yaitu air sungai (irigasi). Dari factor kontinuitas, sumber tersebut sangat memungkinkan akan dapat memiliki kualitas yang berbeda sehingga memerlukan proses pengolahan yang berbeda. Dari uraian tersebut diatas, pemilihan sumber air baku air bersih adalah :

- Untuk sistem komunal diambil dari air sungai-sungai yang melewati sekitar daerah perencanaan.
- Untuk system individu diambil sumber air tanah dangkal atau dalam yang digabungkan dengan air hujan dengan proses pengolahan sederhana atau SIPAS (Sistem Pengolahan Air Sederhana).

Sumber mata air yang dikelola oleh PDAM Kota Baubau sebanyak 11 (Sebelas) mata air dan 5 (lima) diantaranya menggunakan air permukaan.

1.3.4 Demografi

Demografi mendeskripsikan tentang jumlah, struktur dan distribusi penduduk. Analisis mengenai kependudukan merupakan bagian penting yang harus menjadi rujukan pemerintah dalam perencanaan pembangunan daerah.

Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau Tahun 2023 Jumlah Penduduk Kota Baubau berjumlah 161.280 jiwa, penduduk laki-laki berjumlah 80.012 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 81.268 jiwa. Jumlah Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Wolio sebanyak 43.488 Jiwa dan Jumlah Penduduk terendah berada di Kecamatan Bungi sebanyak 8.791 Jiwa. Adapun rincian jumlah Penduduk Kota Baubau Tahun 2023 per Kecamatan dan berdasarkan Jenis Kelamin di sajikan dalam tabel berikut :

Jumlah penduduk Kota Baubau pada tahun 2023 Per kecamatan

NO	Kecamatan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Betoambari	21.806
2	Wolio	43.484
3	Murhum	20.860
4	Batupoaro	27.150
5	Bungi	8.791
6	Lea-lea	9.118
7	Kokalukuna	20.913
8	Sorawolio	9.158
TOTAL		161.280

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, 2023.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Betoambari	10.816	10.990	21.806
2	Wolio	21.498	21.986	43.484
3	Murhum	10.289	10.571	20.860
4	Batupoaro	13.374	13.776	27.150
5	Bungi	4.431	4.360	8.791
6	Lea-Lea	4.607	4.511	9.118
7	Kokalukuna	10.390	10.523	20.913
8	Sorawolio	4.607	4.551	9.158
TOTAL		80.012	81.268	161.280

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, 2023.

1.3.5 Kawasan Rawan Bencana

1. Kawasan Rawan Banjir

Kawasan rawan bencana banjir di Kota Baubau berada Kecamatan Batupoaro Kelurahan Wameo, Kecamatan Bungi Kelurahan Liabuku, Kelurahan Waliabuku dan Kelurahan Ngkaring-karing, Kecamatan Wolio Kelurahan Kadolokatapi dan Kecamatan Sorawolio Kelurahan Kaisabu Baru.

2. Kawasan Rawan Angin Kencang

Kawasan rawan angin kencang di Kota Baubau berada di Kecamatan Betoambari Kelurahan Sulaa, Kecamatan Batupoaro Kelurahan Wameo dan Kecamatan Wolio Kelurahan Wale, Kelurahan Tomba dan Kelurahan Kadolokatapi.

3. Kawasan Rawan Tanah Longsor

Kawasan rawan tanah longsor di Kota Baubau berada di Kecamatan Betoambari Kelurahan Lipu, Kecamatan Batupoaro Kelurahan Wameo dan Kelurahan Tarafu, Kecamatan Wolio Kelurahan Bataraguru dan Kelurahan Tomba, Kecamatan Lea-Lea Kelurahan Kolese dan Kecamatan Kokalukuna Kelurahan Liwuto.

4. Kawasan Rawan Gelombang Tinggi

Kawasan rawan gelombang tinggi di Kota Baubau berada di Kecamatan Batupoaro Kelurahan Wameo, Kelurahan Tarafu dan Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Betoambari Kelurahan Sulaa.

1.3.6 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk melihat hasil- hasil pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB mencerminkan kinerja perekonomian suatu daerah. Menurut definisi, PDRB adalah nilai produk barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Dari data PDRB dapat dilihat Tingkat pertumbuhan dan struktur ekonomi suatu wilayah. Struktur ekonomi suatu wilayah biasanya disajikan dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan pada harga satu tahun dasar tertentu.

Kategori yang memiliki kontribusi terbesar pada perekonomian Kota Baubau yaitu sektor konstruksi dan ketegori perdagangan besar dan eceran, reparasi motor dan mobil masing-masing tumbuh sebesar 1,61 persen dan 5,17 persen pada tahun 2023. Meskipun pertumbuhan pada kategori ini relative kecil dibandingkan kategori jasa lainnya, tetapi kontribusi keduanya mencapai 42,45 persen atau hamper separuh perekonomian Kota Baubau.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan tolok ukur keberhasilan sebuah Pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi terwujud atas berbagai proses kenaikan kapasitas produksi yang diwujudkan ke dalam kenaikan pendapatan wilayah. Kondisi pertumbuhan ekonomi dalam satu wilayah dipengaruhi beberapa faktor yang menyebabkan kondisinya bisa naik, stagnan atau bahkan menurun. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain kondisi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, ketersediaan modal, perkembangan teknologi dan kondisi sosial politik.

Aktivitas perekonomian masyarakat Kota Baubau dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB dihitung menggunakan dua pendekatan, yaitu: (1) atas dasar harga konstan (ADHK) dengan tahun dasar 2010, dan (2) atas dasar harga berlaku (ADHB). Nilai PDRB ADHK digunakan untuk mengukur pertumbuhan PDRB yang menggambarkan laju

pertumbuhan ekonomi (LPE) dari tahun dasar, sedangkan nilai PDRB ADHB digunakan untuk melihat struktur perekonomian wilayah setiap tahunnya.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Baubau pada tahun 2023 adalah sebesar 3,38 persen. Meskipun angka pertumbuhan ekonomi Kota Baubau tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang mampu tumbuh diatas 6 persen, namun hal tersebut menunjukkan adanya perbaikan kondisi perekonomian di Kota Baubau setelah mengalami kontraksi pertumbuhan pada tahun 2020 sebesar -0,81 persen. Hampir semua lapangan usaha di Kota Baubau terkontraksi sebagai dampak dari Pandemi Covid-19 pada tahun 2020.

1.4 Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM

Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM dalam pelaksanaan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah adalah suatu hal yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan oleh tim penerapan SPM untuk dilakukan dan/atau diselesaikan, sehingga pelayanan dasar minimal dapat dirasakan oleh masyarakat.

Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah berdasarkan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategi yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM.

Strategi tim penerapan SPM dalam menyusun Rencana Aksi SPM Daerah adalah memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada di pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh tim penerapan SPM dalam merumuskan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat inisiasi yang berisi solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh tim penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian SPM, sehingga rumusan strategi Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah yang disusun merupakan suatu rangkaian hubungan yang saling mempengaruhi.

Dalam upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan, maka diperlukan konsistensi Perangkat Daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan Tim Penerapan SPM Daerah untuk memastikan dan mengawal bahwa :

1. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran;
2. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
3. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau.

BAB II

KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

2.1 Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM

Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Strategis Kota Baubau 2024-2026 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut :

2.2.1 Bidang Pendidikan

Tabel 2.1 Kondisi Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kota Baubau Tahun 2023

Kota	SPM Bidang Pendidikan									Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pendidikan Anak Usia Dini			Pendidikan Dasar			Pendidikan Kesetaraan				
	Usia 5 (Lima) Tahun sampai dengan 6 (Enam) Tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini			Usia 7 (Tujuh) Tahun sampai dengan 15 (Lima Belas) Tahun untuk jenis pelayanan Dasar Pendidikan Dasar			Usia 7 (Tujuh) Tahun sampai dengan 18 (Delapan Belas) Tahun untuk jenis pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BAUBAU	6.220 Orang	5.360 Orang	86,17 %	28.637 Orang	26.817 Orang	93,64%	38.383 Orang	456 Orang	1,19%	2.920.059.355	2.887.470.635

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kota Baubau Tahun 2023

2.2.2 Bidang Kesehatan

Tabel 2.2 Kondisi Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kota Baubau Tahun 2023

Kota	SPM Bidang Kesehatan																				
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Pelayanan Kesehatan Balita			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
BAUBAU	3.254	2.671	82%	3.106	2.689	87 %	2.958	2.725	92%	14.843	6314	43%	28.637	10.321	36%	10.3832	45.884	44%	13.048	12.217	94%
	Orang	Orang		Orang	Orang		Orang	Orang		Orang	Orang		Orang	Orang		Orang	Orang		Orang	Orang	

SPM Bidang Kesehatan																Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Miletus			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia/ Human Immunode ficiency. Virus Yang Bersifat Peningkatan / Promotif dan Pencegahan / Preventif					
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)			
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37			
27.734	14.194	51%	2.659	2.659	100%	280	280	100%	4.442	4.442	100%	5.139	4.375	85%	4.020.382.108	3.747.077.080	
Orang	Orang		Orang	Orang		Orang	Orang		Orang	Orang		Orang	Orang				

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kota Baubau Tahun 2023

2.2.3 Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 2.3 Kondisi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kota Baubau Tahun 2023

Kota	SPM Bidang Pekerjaan Umum						Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-Hari			Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BAUBAU	187.448 Orang	8.256 Orang	44%	187.448 Orang	6.506 Orang	35%	10.196.498.900	10.192.487.000

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kota Baubau Tahun 2023

2.2.4 Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 2.4 Kondisi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kota Baubau Tahun 2023

Kota	SPM Bidang Perumahan Rakyat						Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah			Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BAUBAU	172 Orang	172 Orang	100%	0 Orang	0 Orang	100%	52.016.480	52.016.480

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kota Baubau Tahun 2023

2.2.5 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.5 Kondisi Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kota Baubau Tahun 2023

Kota	SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat															Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Pelayanan Informasi Rawan Bencana			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Kebencanaan)			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Damkar)				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BAUBAU	1.842 Orang	1.382 Orang	75,77%	10.882 Orang	10.882 Orang	100%	321 Orang	321 Orang	100%	0 Orang	0 Orang	100%	15.893 Orang	14.746 Orang	92,78 %	1.922.889.311	1.751.995.050

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kota Baubau Tahun 2023

2.2.6 Bidang Sosial

Tabel 2.6 Kondisi Capaian SPM Bidang Sosial di Kota Baubau Tahun 2023

Kota	SPM Bidang Sosial															Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Soaial Dasar Anak Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Diluar Panti			Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Daerah				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BAUBAU	287 Orang	287 Orang	100%	275 Orang	275 Orang	100%	269 Orang	269 Orang	100%	207 Orang	207 Orang	100%	410 Orang	602 Orang	100%	542.562.999	498.589.579

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kota Baubau Tahun 2023

2.2 Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM

Dalam rangka pemenuhan pencapaian penerapan SPM di Kota Baubau ditemukan beberapa permasalahan, sebagai berikut:

2.2.1 Bidang Pendidikan

Bidang Pendidikan secara umum cukup baik. Akan tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, yaitu sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya ketersediaan basis data sebagai dasar penghitungan dalam penerapan dan pemenuhan SPM urusan Pendidikan terlebih untuk data eksternal yang bersifat lintas sektoral;
- 2) Masih rendahnya capaian partisipasi sekolah pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 3) Tenaga pendidik pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) belum 10% berkualifikasi Pendidikan S1/D4;
- 4) Belum optimalnya hasil assessment nasional, masih banyak indikator rendah pada raport Pendidikan daerah.

2.2.2 Bidang Kesehatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Keterlambatan Puskesmas dalam pengiriman laporan data ke Dinas Kesehatan;
- 2) Masih ada Puskesmas yang tidak melakukan penjarangan/pemeriksaan berkala;
- 3) pelayanan Kesehatan Balita belum optimal karena masih banyak Ibu yang tidak membawa balitanya ke Posyandu karena kurangnya pengetahuan dan keterbatasan waktu bagi ibu yang bekerja;
- 4) pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar hanya dilakukan pada saat penjarangan yaitu pada awal tahun ajaran baru dan hanya dilakukan pada anak kelas 1 dan kelas 6 SD ;
- 5) Kurangnya tenaga (SDM) di puskesmas sebagai tenaga operator dan petugas pendataan di lapangan;
- 6) Belum semua programmer Penyakit Tidak Menular (PTM) Puskesmas mendapat pelatihan PTM.

2.2.3 Bidang Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Air Minum di Kota Baubau masih bergilir;
- 2) Minimnya pembiayaan operasional pengelolaan, pemeliharaan dan termasuk SDM pengelola dan anggaran pelaksanaan penerapan SPM;
- 3) Belum terlaksananya secara maksimal proses pengumpulan pendataan, proses evaluasi dan pembinaan dalam penerapan SPM dan sulitnya menentukan kriteria penerima layanan dan berkoordinasi dengan pihak yang terkait dengan data yang dibutuhkan;
- 4) Kurangnya sumberdaya aparatur dan tenaga pengelola teknis kegiatan yang berkompeten dan berkompotensi;
- 5) Minimnya sarana prasarana pada saat pengumpulan data dan minimnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan teknis baik perencanaan maupun pengawasan;
- 6) Penetapan sasaran belum berdasarkan data riil (*by name by address*) tetapi masih menggunakan estimasi sehingga sulit untuk melakukan perhitungan kebutuhan;
- 7) Teridentifikasi jumlah jamban yang belum layak, belum memiliki tangka septik dan berpotensi mencemari air tanah;
- 8) IPLT yang telah dibangun di tahun 2019 belum beroperasi optimal dalam melakukan penyedotan;
- 9) Rendahnya pengetahuan warga mengenai pengelolaan air limbah domestik sesuai standar teknis dan standar Kesehatan.

2.2.4 Bidang Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan bidang Perumahan Rakyat secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM;
- 2) Belum terlaksananya proses pengumpulan dan pendataan secara maksimal;
- 3) Sulitnya menentukan kriteria penerima layanan dan berkoordinasi dengan pihak yang terkait dengan data yang dibutuhkan;
- 4) Kurangnya sumber daya aparatur dan sarana prasarana pada saat

pengumpulan data;

- 5) Masih dalam tahapan pendataan guna memperoleh data BNBA dan masih kesulitan cara perhitungan penerapan SPM dikaitkan dengan anggaran;
- 6) Minimnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan teknis baik perencanaan maupun pengawasan.
- 7) Pemenuhan SPM dalam pelayanan dasar penyediaan rumah tidak layak huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah belum dapat dilakukan sebab belum adanya penetapan Masyarakat yang akan dilakukan relokasi.

2.2.5 Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Penyelenggaraan bidang Trantibumlinmas secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- **Ketentraman dan Ketertiban Umum**

- 1) Minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM dalam menunjang kegiatan khususnya dibidang tanggap darurat dan penanggulangan;
- 2) Kurangnya SDM dilapangan dalam melaksanakan penanganan bencana dan kurangnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mempengaruhi terhadap kinerja PD;
- 3) Kurangnya kendaraan operasional patrol ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) Belum optimalnya penerapan dan penegakan Perda yang telah ditetapkan;
- 5) Belum adanya data tentang daerah rawan bencana yang memadai; dan
- 6) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

- **Kebencanaan**

- 1) Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) perlu untuk di revisi mengingat dokumen terakhir dibuat di tahun 2018;
- 2) Belum adanya kebijakan tentang penanggulangan bencana di daerah dalam bentuk Perda dan Perkada;
- 3) Kurangnya fungsi koordinasi dan sinergi antara dinas/instansi terkait;
- 4) Keterbatasan anggaran operasional penanggulangan bencana;
- 5) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

- **Kebakaran**

- 1) Sosialisasi tentang penerapan SPM bidang kebakaran masih kurang sehingga

penyusunan rencana kerja tidak mengacu pada pencapaian SPM;

- 2) Pencapaian *respon time* perlu ditingkatkan lagi dengan membangun posko-posko pemadam kebakaran disetiap kecamatan atau kelurahan;
- 3) Belum adanya Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kebakaran;
- 4) Kurangnya koordinasi dengan pihak terkait dalam penanggulangan kebakaran;
- 5) Kurangnya alokasi anggaran yang dialokasikan untuk pencegahan kebakaran, sosialisasi, penyuluhan, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemadam kebakaran.

2.2.6 Bidang Sosial

Penyelenggaraan bidang Sosial berkembang seiring waktu ke arah yang lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM;
- 2) Belum optimalnya pengumpulan data terhadap rehabilitas sosial terutama data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- 3) Belum berjalannya program rehabilitasi sosial secara minimal;
- 4) Belum tersedianya peta kerawanan dan mitigasi bencana secara lengkap dan menyeluruh;
- 5) Keterbatasan dan minimnya sumber daya manusia dalam penerapan SPM;
- 6) Minimnya sarana dan prasarana pendukung penerapan SPM; dan
- 7) Kurangnya pelaksanaan diklat dan bimtek terhadap SDM.

STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

BAB III

Dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kota Baubau memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM, diperlukan penguatan Tim Penerapan SPM dengan didukung alokasi anggaran serta memastikan pengintegrasian program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan daerah.

3.1 Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi

Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Permenadagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah J.o Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Vertifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodeifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.1.1 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Strategi pencapaian SPM Kota Baubau Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Ruang Kelas/Ruang Guru
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana Prasarana dan Utilitas

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
		Usia Dini (PAUD)		Guru PAUD	
			2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana Prasarana dan Utilitas
			3	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Peserta Didik
			4	Penyiapan dan tindak lanjut Evaluasi Satuan PAUD	PAUD yang di Evaluasi
			5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	PAUD yang dilaksanakan Pembinaan
			7	Pengelolaan Dana BOP PAUD	PAUD yang Mengelola BOP
		Pengelolaan Pendidikan Dasar (SD)	1	Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas
			2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/ TU
			3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah
			4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah
			5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU
			6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah
			7	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang Perpustakaan Sekolah

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
			8	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah
			9	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Peserta Didik
			10	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Satuan Pendidikan Dasar
			11	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta Didik
			12	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah	Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			13	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Sekolah Dasar
			14	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Laboratorium Sekolah Dasar
		Pengelolaan Pendidikan Dasar (SMP)	1	Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas
			2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/ TU
			3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah
			4	Pembangunan Laboratorium	Ruang Laboratorium
			5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah
			6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas
			7	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Ruang Laboratorium
			8	Rehabilitasi Sedang/Berat	Sarana, Prasarana

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	dan Utilitas Sekolah
			9 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Peserta Didik
			10 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Peserta Didik
			11 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta Didik
			12 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			13 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Sekolah Menengah Pertama
			14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Ruang TU
			15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Ruang Kepala Sekolah
		Pengelolaan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	1 Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan
			2 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Peserta Didik
			3 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
			4 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
			5	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non formal / Kesetaraan	Sekolah Non Formal / Kesetaraan
2	Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dokumen
			2	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Buku

3.1.2 SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang
			2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang
			3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang
			4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Orang
			5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang
			6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Orang
			7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Orang
			8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Orang
			9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Miletus	Orang

			10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang
			11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Orang
			12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Orang

3.1.3 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota	1	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Liter/Detik
			2	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	SR
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	1	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Rumah Tangga

3.1.4 SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	Program Pengembangan	Pendataan	1	Pendataan dan Verifikasi	Dokumen

	Perumahan	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Rumah

3.1.5 SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat

NO	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3		4	5
Satuan Polisi Pamong Praja					
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penegakan Peraturan Daerah Kab./Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan walikota	Laporan
			2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan
			3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan
			Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah	1	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	
			2 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kasus
			3 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen
			4 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen
			5 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang
			6 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Trantibum	Dokumen
			7 Pengadaan dan	Unit

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum (Pengadaan dan Rehabilitasi Pos Jaga/Ronda dan Mobilisasi Perlindungan Masyarakat)	
			8	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Dokumen
			9	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan PERDA dan PERKADA	Laporan
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan					
1	Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran & Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan dan Pengendalian kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota	Laporan
			2	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan
			3	Pengadaan Sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Unit
			4	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Orang
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Orang
			2	Pembentukan dan	Kelurahan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
				Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Laporan
Penanggulangan Bencana Daerah					
1	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Orang
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota	Dokumen
			2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	Orang
			3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Unit
			5	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten / Kota	Dokumen
			6	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC)	Orang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			Bencana Kabupaten / Kota	
		Pentaan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten / Kota	Dokumen

3.1.6 SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
			2 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
			3 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan masyarakat Kewenangan Kota	Orang
2	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	1 Penyediaan Permakanan	Orang
			2 Penyediaan Alat Bantu	Orang
			3 Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Orang
			4 Pemberian Layanan Rujukan	Orang
			5 Penyediaan Permakanan	Orang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
		Sosial Rehabilitasi	1	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang
		Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	2	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kali
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Orang
			2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Orang
			3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Orang
			4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Orang
4	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1	Penyediaan Makanan	Orang
			2	Penyediaan Sandang	Orang
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Orang

3.2 Rencana Aksi Penerapan SPM

Tabel 3.1
Renaksi Penerapan SPM Urusan Pendidikan Kota Baubau Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Penerima Layanan Dasar Tahun 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	Pendidikan Anak Usia Dini	orang	5360	5414	5468					APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
1	Angka partisipasi sekolah	%	5360			5414	5414	6,160,284,500		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
2	Angka partisipasi murni	%								APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
3	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	72			72.72	72.72	448,655,000		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
4	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	72,98			73.71	73.71	1,144,272,000		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
5	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	5			5.05	5.05			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
6	Kecukupan formasi guru ASN	%	67,05			67.72	67.72			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
7	Indeks distribusi guru	%	100			101.00	101.00			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
8	Proporsi PTK bersertifikat	%	38,97			39.36	39.36			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
9	Proporsi PTK penggerak*	%	4			4.04	4.04			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
2	Pendidikan Dasar	orang	26817	27085	27356					APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
	SD	orang	18622	18808	18996					APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
1	Angka partisipasi kasar	%	97,02			97.99	97.99	11,378,210,000		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
2	Angka partisipasi sekolah	%	97,26			98.23	98.23	11,378,210,000		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
3	Kemampuan literasi	Nilai	56,24			56.80	56.80	654,410,800		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
4	Kemampuan numerasi	Nilai	40,17			40.57	40.57	654,410,800		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
5	Perbedaan skor literasi	Nilai	8,26			8.34	8.34			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
6	Perbedaan skor numerasi	Nilai	16,56			16.73	16.73			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Penerima Layanan Dasar Tahun 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
7	Indeks iklim keamanan	Nilai	66,45			67.11	67.11	5,459,426,333		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
8	Indeks iklim kebhinekaan	%	68,79			69.48	69.48	5,459,426,333		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
9	Indeks iklim inklusivitas	%	55,01			55.56	55.56	5,459,426,333		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
10	Kecukupan formasi guru ASN	%	22,5			22.73	22.73			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
11	Indeks distribusi guru	%	0,41			0.41	0.41			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
12	Proporsi PTK bersertifikat	%	39,84			40.24	40.24			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
13	Proporsi PTK penggerak*	%	9			9.09	9.09			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
	SMP		8195	8277	8360					APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
1	Angka partisipasi kasar	%	101,18			102.19	102.19	20,580,349,972		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
2	Angka partisipasi sekolah	%	86,34			87.20	87.20	20,580,349,972		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
3	Kemampuan literasi	Nilai	52,18			52.70	52.70	1,130,493,800		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
4	Kemampuan numerasi	Nilai	31,84			32.16	32.16	1,130,493,800		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
5	Perbedaan skor literasi	Nilai	10,08			10.18	10.18			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
6	Perbedaan skor numerasi	Nilai	2,09			2.11	2.11			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
7	Indeks iklim keamanan	Nilai	64,38			65.02	65.02	136,545,000		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
8	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	63,4			64.03	64.03	136,545,000		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
9	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	54,9			55.45	55.45	136,545,000		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
10	Kecukupan formasi guru ASN	%	17,5			17.68	17.68			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
11	Indeks distribusi guru	%	0,39			0.39	0.39			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
12	Proporsi PTK bersertifikat	%	58,52			59.11	59.11			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
13	Proporsi PTK penggerak*	%	8			8.08	8.08			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Penerima Layanan Dasar Tahun 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
3	Pendidikan Kesetaraan	orang	456	461	466					APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
1	Angka partisipasi kasar	%								APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
2	Angka partisipasi sekolah	%	98,81			99.80	99.80	2,563,500,000		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
3	Kemampuan literasi	Nilai	42,64			43.07	43.07			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
4	Kemampuan numerasi	Nilai	31,50			31.82	31.82			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
5	Perbedaan skor literasi	Nilai	11,29			11.40	11.40			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
6	Perbedaan skor numerasi	Nilai	13,65			13.79	13.79			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
7	Indeks iklim keamanan	Nilai	70,43			71.13	71.13			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
8	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	64,17			64.81	64.81			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
9	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	58,61			59.19	59.19			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
10	Kecukupan formasi guru ASN	%								APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
11	Indeks distribusi guru	%								APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
12	Proporsi PTK bersertifikat	%								APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
13	Proporsi PTK penggerak*	%								APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	Pendidikan Anak Usia Dini	orang	5468	5523					APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	5522	5577				APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	
1	Angka partisipasi sekolah	%			5468	5468	6,221,887,345		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN			5522	5522	6,284,106,218	APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	
2	Angka partisipasi murni	%							APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN						APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPDI (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
3	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%			73.44	73.44	453,141,550		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN			74.16	74.16	457,672,966		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
4	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%			74.44	74.44	1,155,714,720		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN			75.17	75.17	1,167,271,867		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
5	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%			5.10	5.10			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN			5.15	5.15			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
6	Kecukupan formasi guru ASN	%			68.39	68.39			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN			69.06	69.06			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
7	Indeks distribusi guru	%			102.00	102.00			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN			103.00	103.00			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
8	Proporsi PTK bersertifikat	%			39.75	39.75			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN			40.14	40.14			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
9	Proporsi PTK penggerak*	%			4.08	4.08			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN			4.12	4.12			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
2	Pendidikan Dasar	orang	27353	27627					APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	27621	27897					APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
	SD	orang	18994	19184					APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	19180	19372					APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
1	Angka partisipasi kasar	%			98.96	98.96	11,491,992,100		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN			99.93	99.93	11,606,912,021		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
2	Angka partisipasi sekolah	%			99.21	99.21	11,491,992,100		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN			100.18	100.18	11,606,912,021		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
3	Kemampuan literasi	Nilai			57.36	57.36	660,954,908		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN			57.93	57.93	667,564,457		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
4	Kemampuan numerasi	Nilai			40.97	40.97	660,954,908		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN			41.38	41.38	667,564,457		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
5	Perbedaan skor literasi	Nilai			8.43	8.43			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN			8.51	8.51			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
6	Perbedaan skor numerasi	Nilai			16.89	16.89			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN			17.06	17.06			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
7	Indeks iklim keamanan	Nilai			67.78	67.78	5,514,020,596		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN			68.44	68.44	5,569,160,802		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
8	Indeks iklim kebhinnekaan	%			70.17	70.17	5,514,020,596		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN			70.85	70.85	5,569,160,802		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
9	Indeks iklim inklusivitas	%			56.11	56.11	5,514,020,596		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN			56.66	56.66	5,569,160,802		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
10	Kecukupan formasi guru ASN	%			22.95	22.95			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN			23.18	23.18			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
11	Indeks distribusi guru	%			0.42	0.42			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN			0.42	0.42			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
12	Proporsi PTK bersertifikat	%			40.64	40.64			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN			41.04	41.04			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
13	Proporsi PTK penggerak*	%			9.18	9.18			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN			9.27	9.27			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
	SMP		8359	8443					APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	8441	8525					APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
1	Angka partisipasi kasar	%			103.20	103.20	20,786,153,472		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN			104.22	104.22	20,994,015,006		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
2	Angka partisipasi sekolah	%			88.07	88.07	20,786,153,472		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN			88.93	88.93	20,994,015,006		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
3	Kemampuan literasi	Nilai			53.22	53.22	1,141,798,738		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN			53.75	53.75	1,153,216,725		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
4	Kemampuan numerasi	Nilai			32.48	32.48	1,141,798,738		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN			32.80	32.80	1,153,216,725		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
5	Perbedaan skor literasi	Nilai			10.28	10.28			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN			10.38	10.38			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
6	Perbedaan skor numerasi	Nilai			2.13	2.13			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN			2.15	2.15			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
7	Indeks iklim keamanan	Nilai			65.67	65.67	137,910,450		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN			66.31	66.31	139,289,555		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2025)					Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Inisiasi	Pencapaian SPM (2026)					Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Inisiasi
			Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
8	Indeks iklim kebhinnekaan	Nilai		64.67	137,910,450			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN			65.30	139,289,555		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN		
9	Indeks iklim inklusivitas	Nilai		56.00	137,910,450			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN			56.55	139,289,555		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN		
10	Kecukupan formasi guru ASN	%		17.85				APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN			18.03			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN		
11	Indeks distribusi guru	%		0.40				APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN			0.40			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN		
12	Proporsi PTK bersertifikat	%		59.69				APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN			60.28			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN		
13	Proporsi PTK penggerak*	%		8.16				APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN			8.24			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN		
3	Pendidikan Kesetaraan	orang	466	471				APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN		476					APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	
1	Angka partisipasi kasar	%						APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN							APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	
2	Angka partisipasi sekolah	%		100.79	2,589,135,000			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN			101.77	2,615,026,350		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN		
3	Kemampuan literasi	Nilai		43.49				APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN			43.92			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN		
4	Kemampuan numerasi	Nilai		32.13				APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN			32.45			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN		
5	Perbedaan skor literasi	Nilai		11.52				APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN			11.63			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN		
6	Perbedaan skor numerasi	Nilai		13.92				APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN			14.06			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN		
7	Indeks iklim keamanan	Nilai		71.84				APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN			72.54			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN		
8	Indeks iklim kebhinnekaan	Nilai		65.45				APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN			66.10			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN		
9	Indeks iklim inklusivitas	Nilai		59.78				APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN			60.36			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN		

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPBI (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
10	Kecukupan formasi guru ASN	%						APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN							APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	
11	Indeks distribusi guru	%						APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN							APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	
12	Proporsi PTK bersertifikat	%						APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN							APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	
13	Proporsi PTK penggerak*	%						APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN							APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	

Tabel 3.2
Renaksi Penerapan SPM Urusan Kesehatan Kota Baubau Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Penerima Layanan Dasar Tahun 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	Pelayanan kesehatan Ibu hamil	Orang	2671	3303	2208			376,428,000	APBD	DINAS KESEHATAN	
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin	1382			3303	2208		APBN	DINAS KESEHATAN	
2	Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	2671			594540	397440		APBN	DINAS KESEHATAN	
3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	17			53	53		APBN	DINAS KESEHATAN	
4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	17			107	107		APBN	DINAS KESEHATAN	
5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	17			27	27		APBN	DINAS KESEHATAN	
6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	17			495	331		APBN	DINAS KESEHATAN	
7	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Hepatitis B	Paket	17			53	53		APBN	DINAS KESEHATAN	
8	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Sifilis	Paket	17			107	107		APBN	DINAS KESEHATAN	
9	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : HIV	Paket	17			107	107		APBN	DINAS KESEHATAN	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Penerima Layanan Dasar Tahun 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
10	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	2671			3303	2208		APBN	DINAS KESEHATAN	
11	Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	2671			2641	2641	221,700,000	APBD	DINAS KESEHATAN	
12	Media KIE	Paket	17			34	34		APBN	DINAS KESEHATAN	
13	Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	0			178	178		APBN	DINAS KESEHATAN	
14	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)"	Orang	41			41	41		APBN	DINAS KESEHATAN	
15	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	181			181	181		APBN	DINAS KESEHATAN	
16	Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	160			160	160		APBN	DINAS KESEHATAN	
17	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	58			58	58		APBN	DINAS KESEHATAN	
18	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	51			51	51		APBN	DINAS KESEHATAN	
19	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	0			3303	2170	12,814,000	APBN	DINAS KESEHATAN	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	2689	3293	2145			71,484,000	APBD	DINAS KESEHATAN	
1	Formulir partograf	Formulir	2689			3293	2145		APBN	DINAS KESEHATAN	
2	Kartu ibu (rekam medis)	Paket	2689			3293	2145		APBN	DINAS KESEHATAN	
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	Buku	2689			2641	2641		APBD	DINAS KESEHATAN	
4	Media KIE	Paket	17			34	34		APBN	DINAS KESEHATAN	
5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk	Orang	41			41	41		APBN	DINAS KESEHATAN	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Penerima Layanan Dasar Tahun 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
	dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)										
6	Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	181			160	160		APBN	DINAS KESEHATAN	
7	Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	160			181	181		APBN	DINAS KESEHATAN	
8	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	58			58	58		APBN	DINAS KESEHATAN	
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	51			51	51		APBN	DINAS KESEHATAN	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	<i>Orang</i>	2725	3464	2182			130,327,000	APBD	DINAS KESEHATAN	
1	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	<i>Vaksin</i>	2725			3464	2182		APBN	DINAS KESEHATAN	
2	Vitamin K1 injeksi	<i>Ampul</i>	2725			136	109		APBN	DINAS KESEHATAN	
3	Salap/tetes mata antibiotik	<i>Orang</i>	2725			3464	2182		APBN	DINAS KESEHATAN	
4	Formulir bayi baru lahir	<i>Formulir</i>	2725			3464	2182		APBN	DINAS KESEHATAN	
5	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	<i>Buku</i>	2725			2641	2641	221,700,000	APBN	DINAS KESEHATAN	
6	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	<i>Paket</i>	17			34	34		APBN	DINAS KESEHATAN	
7	Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	<i>Orang</i>	82			82	82		APBN	DINAS KESEHATAN	
8	Tenaga kesehatan : Bidan	<i>Orang</i>	160			160	160		APBN	DINAS KESEHATAN	
9	Tenaga kesehatan : Perawat	<i>Orang</i>	181			181	181		APBN	DINAS KESEHATAN	
10	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	<i>Orang</i>	58			58	58		APBN	DINAS KESEHATAN	
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	<i>Orang</i>	17			17	17		APBN	DINAS KESEHATAN	
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	<i>Orang</i>	51			51	51		APBN	DINAS KESEHATAN	
13	Kader Kesehatan	<i>Orang</i>	165			165	165		APBN	DINAS KESEHATAN	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	<i>Orang</i>	6314	16212	10362			35,223,900	APBD	DINAS KESEHATAN	
1	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	<i>Dokumen</i>	6314			16212	10362		APBN	DINAS KESEHATAN	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Penerima Layanan Dasar Tahun 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir	6314			16212	10362			APBN	DINAS KESEHATAN
3	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Orang	6314			16212	10362	221,700,000	-	APBD	DINAS KESEHATAN
4	Vitamin A Biru	Kapsul	2080			2101	2101			APBN	DINAS KESEHATAN
5	Vitamin A Merah	Kapsul	15878			16212	16037			APBN	DINAS KESEHATAN
6	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	6314			6377	6377			APBN	DINAS KESEHATAN
7	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	6314			14843	10362			APBN	DINAS KESEHATAN
8	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	6314			14843	10362			APBN	DINAS KESEHATAN
9	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	6314			14843	10362			APBN	DINAS KESEHATAN
10	Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	6314			14843	10362			APBN	DINAS KESEHATAN
11	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	6314			14843	10362			APBN	DINAS KESEHATAN
12	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	6314			14843	10362			APBN	DINAS KESEHATAN
13	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	6314			14843	10362			APBN	DINAS KESEHATAN
14	Peralatan Anafilaktik	Paket	17			17	17			APBN	DINAS KESEHATAN
15	Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	17			17	17			APBN	DINAS KESEHATAN
16	Tenaga medis : Dokter	Orang	79			79	79			APBN	DINAS KESEHATAN
17	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	160			160	160			APBN	DINAS KESEHATAN
18	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	181			181	181			APBN	DINAS KESEHATAN
19	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	51			51	51			APBN	DINAS KESEHATAN
20	Guru PAUD	Orang	384			384	384			APBN	DINAS KESEHATAN
21	Kader Kesehatan	Orang	165			165	165			APBN	DINAS KESEHATAN
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Orang	10321	28637	17447			1,235,470,000		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Form pencatatan/Buku raport kesehatan	Buku	10321			28637	17447			APBN	DINAS KESEHATAN
2	Form pencatatan/Buku pemantauan kesehatan	Buku	10321			28637	17447			APBN	DINAS KESEHATAN
3	Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen	10321			28637	17447			APBN	DINAS KESEHATAN
4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Formulir	204			206	206			APBN	DINAS KESEHATAN
5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	204			206	206			APBN	DINAS KESEHATAN

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Penerima Layanan Dasar Tahun 2023.	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
6	Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	Tablet	4893			9733	9733		APBN	DINAS KESEHATAN	
7	Alat Pemeriksaan Hb	Alat	17			34	34		APBN	DINAS KESEHATAN	
8	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	Strip	4416			4460	4460		APBN	DINAS KESEHATAN	
9	Media promosi kesehatan	Paket	17			34	34		APBN	DINAS KESEHATAN	
10	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Vaksin	3157			28637	17447		APBN	DINAS KESEHATAN	
11	Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	89			89	89		APBN	DINAS KESEHATAN	
12	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	160			160	160		APBN	DINAS KESEHATAN	
13	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	181			181	181		APBN	DINAS KESEHATAN	
14	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	51			51	51		APBN	DINAS KESEHATAN	
15	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	58			58	58		APBN	DINAS KESEHATAN	
16	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	171			171	171		APBN	DINAS KESEHATAN	
17	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	0			0	0		APBN	DINAS KESEHATAN	
18	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/ peer conselo	Orang	165			165	165		APBN	DINAS KESEHATAN	
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Orang	45884	106673	65509			13,592,000	APBD	DINAS KESEHATAN	
1	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	17			34	34		APBN	DINAS KESEHATAN	
2	Alat : Alat ukur berat badan	Unit	17			34	34		APBN	DINAS KESEHATAN	
3	Alat : Alat ukur tinggi badan	Unit	17			17	17		APBN	DINAS KESEHATAN	
4	Alat : Alat ukur lingkar perut	Unit	17			34	34		APBN	DINAS KESEHATAN	
5	Alat : Tensimeter	Unit	17			34	34		APBN	DINAS KESEHATAN	
6	Alat : Glukometer	Unit	17			17	17		APBN	DINAS KESEHATAN	
7	Alat: Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit	17			17	17		APBN	DINAS KESEHATAN	
8	Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	17			17	17		APBN	DINAS KESEHATAN	
9	Reagen pemeriksaan Hb	Unit	17			17	17		APBN	DINAS KESEHATAN	
10	Kit Ophthalmologi Komunitas	Unit	17			17	17		APBN	DINAS KESEHATAN	
11	Kuesioner PUMA (Deteksi dini PPOK)	Dokumen	0			0	0		APBN	DINAS KESEHATAN	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Penerima Layanan Dasar Tahun 2023	Pencapaian SPM (2024)					Intiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
12	Alat Pelayanan KB	Unit							APBN	DINAS KESEHATAN	
	a. Set Pemasangan dan Pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit	17			17	17		APBN	DINAS KESEHATAN	
	b. Set Pemasangan dan Pencabutan Implan	Unit	17			17	17		APBN	DINAS KESEHATAN	
	c. Vasectomi Set	Unit	0			1	1		APBN	DINAS KESEHATAN	
13	Alat : Tes strip gula darah	Unit	17			17	17		APBN	DINAS KESEHATAN	
14	Alat : Lancet	Unit	17			17	17		APBN	DINAS KESEHATAN	
15	Alat : Kaps alkohol	Unit	17			17	17		APBN	DINAS KESEHATAN	
16	Alat : KIT IVA Tes	Unit	17			17	17		APBN	DINAS KESEHATAN	
17	Set Pemasangan dan Pencabutan AKDR	Unit	17			17	17		APBN	DINAS KESEHATAN	
18	Set Pemasangan dan Pencabutan Implan	Unit	17			17	17		APBN	DINAS KESEHATAN	
19	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	204			206	206		APBN	DINAS KESEHATAN	
20	Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul	5036			5086	5086		APBN	DINAS KESEHATAN	
21	Tenaga medis : Dokter	Orang	79			79	79		APBN	DINAS KESEHATAN	
22	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	160			160	160		APBN	DINAS KESEHATAN	
23	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	181			181	181		APBN	DINAS KESEHATAN	
24	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	51			51	51		APBN	DINAS KESEHATAN	
25	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	171			171	171		APBN	DINAS KESEHATAN	
28	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	165			165	165		APBN	DINAS KESEHATAN	
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Orang	12217	14484	12417			7,411,000	APBD	DINAS KESEHATAN	
1	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	17			17	17		APBN	DINAS KESEHATAN	
2	Glukometer (alat pemeriksaan gula darah)	Paket	17			17	17		APBN	DINAS KESEHATAN	
3	Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	17			17	17		APBN	DINAS KESEHATAN	
4	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	17			17	17		APBN	DINAS KESEHATAN	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Penerima Layanan Dasar Tahun 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
5	Instrumen skrining lansia sederhana (SKILAS), instrumen aktivitas kehidupan sehari-hari (AKS/Activity daily living (ADL Barthel)	Paket	17			17	17		APBN	DINAS KESEHATAN	
6	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	12217			14484	12417		APBN	DINAS KESEHATAN	
7	Media KIE	Paket	17			34	34		APBN	DINAS KESEHATAN	
8	Tenaga medis : Dokter	Orang	79			79	79		APBN	DINAS KESEHATAN	
9	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	160			160	160		APBN	DINAS KESEHATAN	
10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	181			181	181		APBN	DINAS KESEHATAN	
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	51			51	51		APBN	DINAS KESEHATAN	
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	171			171	171		APBN	DINAS KESEHATAN	
13	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	165			165	165		APBN	DINAS KESEHATAN	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Orang	14194	28835	18020			22,093,000	APBD	DINAS KESEHATAN	
1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	17			34	34		APBN	DINAS KESEHATAN	
2	Obat Hipertensi	Paket	14194			28835	18020		APBN	DINAS KESEHATAN	
3	Tensimeter	Unit	17			17	17		APBN	DINAS KESEHATAN	
4	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	17			17	17		APBN	DINAS KESEHATAN	
5	Media promosi kesehatan	Paket	17			34	34		APBN	DINAS KESEHATAN	
6	Tenaga medis : Dokter	Orang	79			79	79		APBN	DINAS KESEHATAN	
7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	160			160	160		APBN	DINAS KESEHATAN	
8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	181			181	181		APBN	DINAS KESEHATAN	
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	51			51	51		APBN	DINAS KESEHATAN	
10	Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	17			17	17		APBN	DINAS KESEHATAN	
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	58			58	58		APBN	DINAS KESEHATAN	
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	171			171	171		APBN	DINAS KESEHATAN	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Penerima Layanan Dasar Tahun 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang	2659	2665	2612			216,759,000	APBD/APBN	DINAS KESEHATAN	
1	Obat Diabetes Melitus	Paket	2659			2665	2612		APBN	DINAS KESEHATAN	
2	Fotometer atau Glukometer	Unit	17			17	17		APBN	DINAS KESEHATAN	
3	Reagen Glukosa atau Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	Unit	17			17	17		APBN	DINAS KESEHATAN	
4	Formulir pencatatan dan pelaporan, aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIP TM), ASIK, SIMPUS	Formulir	204			206	206		APBN	DINAS KESEHATAN	
5	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	17			34	34		APBN	DINAS KESEHATAN	
6	Sarana dan Prasarana	Unit	17			17	17		APBN	DINAS KESEHATAN	
7	Tenaga medis : Dokter	Orang	79			79	79		APBN	DINAS KESEHATAN	
8	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	160			160	160		APBN	DINAS KESEHATAN	
9	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	181			181	181		APBN	DINAS KESEHATAN	
10	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	58			58	58		APBN	DINAS KESEHATAN	
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	171			171	171		APBN	DINAS KESEHATAN	
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	51			51	51		APBN	DINAS KESEHATAN	
13	Tenaga kesehatan : Teknis Medis (ATLM)	Orang	53			53	53		APBN	DINAS KESEHATAN	
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Orang	280	278	278			82,371,000	APBD	DINAS KESEHATAN	
1	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	17			17	17		APBN	DINAS KESEHATAN	
2	Penyediaan Psikofarmaka	Jenus	4			10	10		APBN	DINAS KESEHATAN	
3	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	Formulir	280			278	278		APBN	DINAS KESEHATAN	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Penerima Layanan Dasar Tahun 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
4	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	Formulir	17			17	17		APBN	DINAS KESEHATAN	
5	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media	17			34	34		APBN	DINAS KESEHATAN	
6	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	79			79	79		APBN	DINAS KESEHATAN	
7	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	Orang	17			17	17		APBN	DINAS KESEHATAN	
8	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang	17			17	17		APBN	DINAS KESEHATAN	
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	4442	4235	3080			406,362,000	APBD	DINAS KESEHATAN	
1	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Paket	17			17	17		APBN	DINAS KESEHATAN	
2	Reagen Zn TB	Kit	4442			4235	3080		APBN	DINAS KESEHATAN	
3	Masker bedah dan Masker N95	Paket	4442			4235	3080		APBN	DINAS KESEHATAN	
4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	17			17	17		APBN	DINAS KESEHATAN	
5	Katrid tes cepat molekule	Test	17			17	17		APBN	DINAS KESEHATAN	
6	Formulir pencatatan dan pelaporan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Formulir	17			17	17		APBN	DINAS KESEHATAN	
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	17			17	17		APBN	DINAS KESEHATAN	
8	Tuberkulin	Vial	27			205	205		APBN	DINAS KESEHATAN	
9	Tenaga medis : Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	Orang	81			81	81		APBN	DINAS KESEHATAN	
10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	181			181	181		APBN	DINAS KESEHATAN	
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	58			58	58		APBN	DINAS KESEHATAN	
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	171			171	171		APBN	DINAS KESEHATAN	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Penerima Layanan Dasar Tahun 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
13	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	53			53	53		APBN	DINAS KESEHATAN	
14	Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	3			3	3		APBN	DINAS KESEHATAN	
15	Kader Kesehatan	Orang	175			175	175		APBN	DINAS KESEHATAN	
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	orang	4375	5236	4002			164,733,000	APBD	DINAS KESEHATAN	
1	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	Media	17			34	34		APBN	DINAS KESEHATAN	
2	Tes cepat HIV (RDT) pertama	Test	17			5236	4002		APBN	DINAS KESEHATAN	
3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	17			5236	4002		APBD	DINAS KESEHATAN	
4	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket	17			5236	4002		APBN	DINAS KESEHATAN	
5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	84			84	84		APBN	DINAS KESEHATAN	
6	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	160			160	160		APBN	DINAS KESEHATAN	
7	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	181			181	181		APBN	DINAS KESEHATAN	
8	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	53			53	53		APBN	DINAS KESEHATAN	
9	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	171			171	171		APBN	DINAS KESEHATAN	
10	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	17			17	17		APBN	DINAS KESEHATAN	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2025)					Indikasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Indikasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Perencana Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Perencana Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Orang	3336	3336			380,192,000	APBD	DINAS KESEHATAN	3369	3369			383,994,203		APBD	DINAS KESEHATAN	
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin			3336	3336		APBN	DINAS KESEHATAN			3369	3369			APBN	DINAS KESEHATAN	
2	Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet			600480	600480		APBN	DINAS KESEHATAN			606485	606485			APBN	DINAS KESEHATAN	
3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Orang			54	54		APBN	DINAS KESEHATAN			54	54			APBN	DINAS KESEHATAN	
4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket			108	108		APBN	DINAS KESEHATAN			109	109			APBN	DINAS KESEHATAN	
5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Gula Darah	Paket			27	27		APBN	DINAS KESEHATAN			27	27			APBN	DINAS KESEHATAN	
6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket			405	405		APBN	DINAS KESEHATAN			409	409			APBN	DINAS KESEHATAN	
7	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Hepatitis B	Paket			54	54		APBN	DINAS KESEHATAN			54	54			APBN	DINAS KESEHATAN	
8	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Sifilis	Paket			108	108		APBN	DINAS KESEHATAN			109	109			APBN	DINAS KESEHATAN	
9	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : HIV	Paket			108	108		APBN	DINAS KESEHATAN			109	109			APBN	DINAS KESEHATAN	
10	Katu ibu/kemam medis ibu	Paket			3336	3336		APBN	DINAS KESEHATAN			3369	3369			APBN	DINAS KESEHATAN	
11	Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku			3336	3336	243,870,000	APBD	DINAS KESEHATAN			3369	3369	253,083,500		APBD	DINAS KESEHATAN	
12	Media KIE	Paket			34	34		APBN	DINAS KESEHATAN			34	34			APBN	DINAS KESEHATAN	
13	Gel USG (untuk Pukekemas yang memiliki alat USG) /proyeksi	Bolot			180	180		APBN	DINAS KESEHATAN			182	182			APBN	DINAS KESEHATAN	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
	pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)																	
14	Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)"	Orang			41	41			APBN	DINAS KESEHATAN			41	41		APBN	DINAS KESEHATAN	
15	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			181	181			APBN	DINAS KESEHATAN			181	181		APBN	DINAS KESEHATAN	
16	Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang			160	160			APBN	DINAS KESEHATAN			160	160		APBN	DINAS KESEHATAN	
17	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang			58	58			APBN	DINAS KESEHATAN			58	58		APBN	DINAS KESEHATAN	
18	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang			51	51			APBN	DINAS KESEHATAN			51	51		APBN	DINAS KESEHATAN	
19	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (KG) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	Orang			3336	3336	13,454,700		APBN	DINAS KESEHATAN			3369	3369	14,127,500	APBN	DINAS KESEHATAN	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	3326	3326			72,198,840		APBD	DINAS KESEHATAN	3360	3360			72,921,000	APBD	DINAS KESEHATAN	
1	Formulir partograf	Formulir			3326	3326			APBN	DINAS KESEHATAN			3360	3360		APBN	DINAS KESEHATAN	
2	Kartu ibu (rekam medis)	Paket			3326	3326			APBN	DINAS KESEHATAN			3360	3360		APBN	DINAS KESEHATAN	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	Buku			3326	3326			APBD	DINAS KESEHATAN			3360	3360			APBD	DINAS KESEHATAN
4	Media KIE	Paket			34	34			APBN	DINAS KESEHATAN			34	34			APBN	DINAS KESEHATAN
5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang			41	41			APBN	DINAS KESEHATAN			41	41			APBN	DINAS KESEHATAN
6	Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang			160	160			APBN	DINAS KESEHATAN			160	160			APBN	DINAS KESEHATAN
7	Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang			181	181			APBN	DINAS KESEHATAN			181	181			APBN	DINAS KESEHATAN
8	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang			58	58			APBN	DINAS KESEHATAN			58	58			APBN	DINAS KESEHATAN
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang			51	51			APBN	DINAS KESEHATAN			51	51			APBN	DINAS KESEHATAN
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	3499	3499			131,630,000		APBD	DINAS KESEHATAN	3534	3534			132,947,000		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin			3499	3499			APBN	DINAS KESEHATAN			3534	3534			APBN	DINAS KESEHATAN

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
2	Vitamin K1 injeksi	Ampul			138	138			APBN	DINAS KESEHATAN			139	139			APBN	DINAS KESEHATAN
3	Salep/teles mata antibiotik	Orang			3499	3499			APBN	DINAS KESEHATAN			3534	3534			APBN	DINAS KESEHATAN
4	Formulir bayi baru lahir	Formulir			3499	3499			APBN	DINAS KESEHATAN			3534	3534			APBN	DINAS KESEHATAN
5	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku			3499	3499			APBN	DINAS KESEHATAN			3534	3534			APBN	DINAS KESEHATAN
6	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket			34	34			APBN	DINAS KESEHATAN			34	34			APBN	DINAS KESEHATAN
7	Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang			82	82			APBN	DINAS KESEHATAN			82	82			APBN	DINAS KESEHATAN
8	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			160	160			APBN	DINAS KESEHATAN			160	160			APBN	DINAS KESEHATAN
9	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			181	181			APBN	DINAS KESEHATAN			181	181			APBN	DINAS KESEHATAN
10	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang			58	58			APBN	DINAS KESEHATAN			58	58			APBN	DINAS KESEHATAN
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang			17	17			APBN	DINAS KESEHATAN			17	17			APBN	DINAS KESEHATAN
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang			51	51			APBN	DINAS KESEHATAN			51	51			APBN	DINAS KESEHATAN
13	Kader Kesehatan	Orang			165	165			APBN	DINAS KESEHATAN			165	165			APBN	DINAS KESEHATAN
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Orang	14991	14991			70,447,600		APBD	DINAS KESEHATAN	15141	15141			71,152,000		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Kuisiner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen			14991	14991			APBN	DINAS KESEHATAN			15141	15141			APBN	DINAS KESEHATAN

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir			14991	14991			APBN	DINAS KESEHATAN			15141	15141			APBN	DINAS KESEHATAN
3	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Orang			14991	14991			APBD	DINAS KESEHATAN			15141	15141			APBD	DINAS KESEHATAN
4	Vitamin A Biru	Kapsul			2122	2122			APBN	DINAS KESEHATAN			2143	2143			APBN	DINAS KESEHATAN
5	Vitamin A Merah	Kapsul			8550	8550			APBN	DINAS KESEHATAN			12998	12998			APBN	DINAS KESEHATAN
6	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin			6441	6441			APBN	DINAS KESEHATAN			6505	6505			APBN	DINAS KESEHATAN
7	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin			14991	14991			APBN	DINAS KESEHATAN			15141	15141			APBN	DINAS KESEHATAN
8	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin			14991	14991			APBN	DINAS KESEHATAN			15141	15141			APBN	DINAS KESEHATAN
9	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin			14991	14991			APBN	DINAS KESEHATAN			15141	15141			APBN	DINAS KESEHATAN
10	Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin			14991	14991			APBN	DINAS KESEHATAN			15141	15141			APBN	DINAS KESEHATAN
11	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin			14991	14991			APBN	DINAS KESEHATAN			15141	15141			APBN	DINAS KESEHATAN
12	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin			14991	14991			APBN	DINAS KESEHATAN			15141	15141			APBN	DINAS KESEHATAN
13	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit			14991	14991			APBN	DINAS KESEHATAN			15141	15141			APBN	DINAS KESEHATAN
14	Peralatan Anafilaktik	Paket			17	17			APBN	DINAS KESEHATAN			17	17			APBN	DINAS KESEHATAN
15	Formula Terapi Gizi Buruk	Paket			17	17			APBN	DINAS KESEHATAN			17	17			APBN	DINAS KESEHATAN
16	Tenaga medis : Dokter	Orang			79	79			APBN	DINAS KESEHATAN			79	79			APBN	DINAS KESEHATAN

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
17	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			160	160			APBN	DINAS KESEHATAN			160	160			APBN	DINAS KESEHATAN
18	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			181	181			APBN	DINAS KESEHATAN			181	181			APBN	DINAS KESEHATAN
19	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang			51	51			APBN	DINAS KESEHATAN			51	51			APBN	DINAS KESEHATAN
20	Guru PAUD	Orang			384	384			APBN	DINAS KESEHATAN			384	384			APBN	DINAS KESEHATAN
21	Kader Kesehatan	Orang			165	165			APBN	DINAS KESEHATAN			165	165			APBN	DINAS KESEHATAN
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Orang	28923	28923			600,000,000		APBD	DINAS KESEHATAN	29213	29213			606,000,000		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Form pencatatan/Buku raport kesehatan/ku	Buku			28923	28923			APBN	DINAS KESEHATAN			29213	29213			APBN	DINAS KESEHATAN
2	Form pencatatan/Buku pemantauan kesehatan	Buku			28923	28923			APBN	DINAS KESEHATAN			29213	29213			APBN	DINAS KESEHATAN
3	Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen			28923	28923			APBN	DINAS KESEHATAN			29213	29213			APBN	DINAS KESEHATAN
4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Formulir			206	206			APBN	DINAS KESEHATAN			206	206			APBN	DINAS KESEHATAN
5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir			206	206			APBN	DINAS KESEHATAN			206	206			APBN	DINAS KESEHATAN
6	Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	Tablet			9733	9733			APBN	DINAS KESEHATAN			9733	9733			APBN	DINAS KESEHATAN
7	Alat Pemeriksaan Hb	Alat			34	34			APBN	DINAS KESEHATAN			34	34			APBN	DINAS KESEHATAN

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
8	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	Strip			4505	4505			APBN	DINAS KESEHATAN			4550	4550			APBN	DINAS KESEHATAN
9	Media promosi kesehatan	Paket			34	34			APBN	DINAS KESEHATAN			34	34			APBN	DINAS KESEHATAN
10	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Vaksin			28923	28923			APBN	DINAS KESEHATAN			29213	29213			APBN	DINAS KESEHATAN
11	Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang			89	89			APBN	DINAS KESEHATAN			89	89			APBN	DINAS KESEHATAN
12	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			160	160			APBN	DINAS KESEHATAN			160	160			APBN	DINAS KESEHATAN
13	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			181	181			APBN	DINAS KESEHATAN			181	181			APBN	DINAS KESEHATAN
14	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang			51	51			APBN	DINAS KESEHATAN			51	51			APBN	DINAS KESEHATAN
15	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang			58	58			APBN	DINAS KESEHATAN			58	58			APBN	DINAS KESEHATAN
16	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			171	171			APBN	DINAS KESEHATAN			171	171			APBN	DINAS KESEHATAN
17	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang			0	0			APBN	DINAS KESEHATAN			0	0			APBN	DINAS KESEHATAN
18	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/ peer consejo	Orang			165	165			APBN	DINAS KESEHATAN			165	165			APBN	DINAS KESEHATAN
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Orang	107740	107740			200,000,000		APBD	DINAS KESEHATAN	108817	108817			202,000,000		APBD	DINAS KESEHATAN

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman			34	34			APBN	DINAS KESEHATAN			34	34			APBN	DINAS KESEHATAN
2	Alat : Alat ukur berat badan	Unit			34	34			APBN	DINAS KESEHATAN			34	34			APBN	DINAS KESEHATAN
3	Alat : Alat ukur tinggi badan	Unit			17	17			APBN	DINAS KESEHATAN			17	17			APBN	DINAS KESEHATAN
4	Alat : Alat ukur lingkar perut	Unit			34	34			APBN	DINAS KESEHATAN			34	34			APBN	DINAS KESEHATAN
5	Alat : Tensimeter	Unit			34	34			APBN	DINAS KESEHATAN			34	34			APBN	DINAS KESEHATAN
6	Alat : Glukometer	Unit			17	17			APBN	DINAS KESEHATAN			17	17			APBN	DINAS KESEHATAN
7	Alat: Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit			17	17			APBN	DINAS KESEHATAN			17	17			APBN	DINAS KESEHATAN
8	Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit			17	17			APBN	DINAS KESEHATAN			17	17			APBN	DINAS KESEHATAN
9	Reagen pemeriksaan Hb	Unit			17	17			APBN	DINAS KESEHATAN			17	17			APBN	DINAS KESEHATAN
10	Kit Opthalmologi Komunitas	Unit			17	17			APBN	DINAS KESEHATAN			17	17			APBN	DINAS KESEHATAN
11	Kuesioner PUMA (Deteksi dini PPOK)	Dokumen			0	0			APBN	DINAS KESEHATAN			0	0			APBN	DINAS KESEHATAN
12	Alat Pelayanan KB	Unit							APBN	DINAS KESEHATAN							APBN	DINAS KESEHATAN
	a. Set Pemasangan dan Pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit			17	17			APBN	DINAS KESEHATAN			17	17			APBN	DINAS KESEHATAN
	b. Set Pemasangan dan Pencabutan Implan	Unit			17	17			APBN	DINAS KESEHATAN			17	17			APBN	DINAS KESEHATAN
	c. Vasectomi Set	Unit			1	1			APBN	DINAS KESEHATAN			1	1			APBN	DINAS KESEHATAN

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2025)				Indikasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)				Instansi Pelaksana	
			Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Matru Layanan Dasar	Realisasi				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Matru Layanan Dasar	Realisasi		
13	Alat : Tes strip gula darah	Unit		17	17		APBN	DINAS KESEHATAN			17		17	APBN	DINAS KESEHATAN
14	Alat : Lancet	Unit		17	17		APBN	DINAS KESEHATAN			17		17	APBN	DINAS KESEHATAN
15	Alat : Kepas alkohol	Unit		17	17		APBN	DINAS KESEHATAN			17		17	APBN	DINAS KESEHATAN
16	Alat : KIT IVA Tes	Unit		17	17		APBN	DINAS KESEHATAN			17		17	APBN	DINAS KESEHATAN
17	Set Pemasangan dan Pencabutan AKDR	Unit		17	17		APBN	DINAS KESEHATAN			17		17	APBN	DINAS KESEHATAN
18	Set Pemasangan dan Pencabutan Implan	Unit		17	17		APBN	DINAS KESEHATAN			17		17	APBN	DINAS KESEHATAN
19	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen		208	208		APBN	DINAS KESEHATAN			210		210	APBN	DINAS KESEHATAN
20	Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul		5137	5137		APBN	DINAS KESEHATAN			5188		5188	APBN	DINAS KESEHATAN
21	Tenaga medis : Dokter	Orang		79	79		APBN	DINAS KESEHATAN			79		79	APBN	DINAS KESEHATAN
22	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang		160	160		APBN	DINAS KESEHATAN			160		160	APBN	DINAS KESEHATAN
23	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang		181	181		APBN	DINAS KESEHATAN			181		181	APBN	DINAS KESEHATAN
24	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang		51	51		APBN	DINAS KESEHATAN			51		51	APBN	DINAS KESEHATAN
25	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang		171	171		APBN	DINAS KESEHATAN			171		171	APBN	DINAS KESEHATAN
26	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang		165	165		APBN	DINAS KESEHATAN			165		165	APBN	DINAS KESEHATAN

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2025)					Indikasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Indikasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Orang	14629	14629			50,000,000	APBD	DINAS KESEHATAN	14775	14775			50,500,000	APBD	DINAS KESEHATAN		
1	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensiometer	Paket			17			APBN	DINAS KESEHATAN			17			APBN	DINAS KESEHATAN		
2	Glukometer (alat pemeriksaan gula darah)	Paket			17			APBN	DINAS KESEHATAN			17			APBN	DINAS KESEHATAN		
3	Alat pemeriksaan kolesterol	Paket			17			APBN	DINAS KESEHATAN			17			APBN	DINAS KESEHATAN		
4	Bahan medis Habis Paket: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket			17			APBN	DINAS KESEHATAN			17			APBN	DINAS KESEHATAN		
5	Instrumen skrining lensia sederhana (SKLAS), Instrumen aktivitas kehidupan sehari-hari (AKS/Activity daily living (ADL Barthel))	Paket			17			APBN	DINAS KESEHATAN			17			APBN	DINAS KESEHATAN		
6	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku			14629		12541	APBN	DINAS KESEHATAN			14775		14775	APBN	DINAS KESEHATAN		
7	Media KIE	Paket			34		34	APBN	DINAS KESEHATAN			34		34	APBN	DINAS KESEHATAN		
8	Tenaga medis : Dokter	Orang			79		79	APBN	DINAS KESEHATAN			79		79	APBN	DINAS KESEHATAN		
9	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			160		160	APBN	DINAS KESEHATAN			160		160	APBN	DINAS KESEHATAN		
10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			181		181	APBN	DINAS KESEHATAN			181		181	APBN	DINAS KESEHATAN		
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang			51		51	APBN	DINAS KESEHATAN			51		51	APBN	DINAS KESEHATAN		

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2025)				Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)				Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Perencana Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi				Perencana Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi			
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang			171	171		APBN	DINAS KESEHATAN			171	171		APBN	DINAS KESEHATAN
13	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang			165	165		APBN	DINAS KESEHATAN			165	165		APBN	DINAS KESEHATAN
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Orang	29123	29123			60.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN	29415	29415		60.000.000		DINAS KESEHATAN
1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket			34	34		APBN	DINAS KESEHATAN			34	34		APBN	DINAS KESEHATAN
2	Obat hipertensi	Paket			29123	29123		APBN	DINAS KESEHATAN			29415	29415		APBN	DINAS KESEHATAN
3	Tensimeter	Unit			17	17		APBN	DINAS KESEHATAN			17	17		APBN	DINAS KESEHATAN
4	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi			17	17		APBN	DINAS KESEHATAN			17	17		APBN	DINAS KESEHATAN
5	Media promosi Kesehatan	Paket			34	34		APBN	DINAS KESEHATAN			34	34		APBN	DINAS KESEHATAN
6	Tenaga medis : Dokter	Orang			79	79		APBN	DINAS KESEHATAN			79	79		APBN	DINAS KESEHATAN
7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			160	160		APBN	DINAS KESEHATAN			160	160		APBN	DINAS KESEHATAN
8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			181	181		APBN	DINAS KESEHATAN			181	181		APBN	DINAS KESEHATAN
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang			51	51		APBN	DINAS KESEHATAN			51	51		APBN	DINAS KESEHATAN
10	Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan	Orang			17	17		APBN	DINAS KESEHATAN			17	17		APBN	DINAS KESEHATAN

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
10	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang			58	58			APBN	DINAS KESEHATAN			58	58			APBN	DINAS KESEHATAN
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			171	171			APBN	DINAS KESEHATAN			171	171			APBN	DINAS KESEHATAN
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang			51	51			APBN	DINAS KESEHATAN			51	51			APBN	DINAS KESEHATAN
13	Tenaga kesehatan : Teknis Medis (ATLM)	Orang			53	53			APBN	DINAS KESEHATAN			53	53			APBN	DINAS KESEHATAN
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Orang	280	280			83,194,710		APBD	DINAS KESEHATAN	282	282			84,027,000		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku			17	17			APBN	DINAS KESEHATAN			17	17			APBN	DINAS KESEHATAN
2	Penyediaan Psikofarmaka	Jenis			10	10			APBD	DINAS KESEHATAN			10	10			APBD	DINAS KESEHATAN
3	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	Formulir			280	280			APBN	DINAS KESEHATAN			282	282			APBN	DINAS KESEHATAN
4	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	Formulir			17	17			APBN	DINAS KESEHATAN			17	17			APBN	DINAS KESEHATAN
5	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media			34	34			APBN	DINAS KESEHATAN			34	34			APBN	DINAS KESEHATAN

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
6	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang			79	79			APBN	DINAS KESEHATAN			79	79			APBN	DINAS KESEHATAN
7	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	Orang			17	17			APBN	DINAS KESEHATAN			17	17			APBN	DINAS KESEHATAN
8	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang			17	17			APBN	DINAS KESEHATAN			17	17			APBN	DINAS KESEHATAN
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	4277	4277			410,426,000		APBD	DINAS KESEHATAN	4320	4320			41,453,000		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Paket			17	17			APBN	DINAS KESEHATAN			34	34			APBN	DINAS KESEHATAN
2	Reagen Zn TB	Kit			4277	4277			APBN	DINAS KESEHATAN			4320	4320			APBN	DINAS KESEHATAN
3	Masker bedah dan Masker N95	Paket			4277	4277			APBN	DINAS KESEHATAN			4320	4320			APBN	DINAS KESEHATAN
4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket			17	17			APBN	DINAS KESEHATAN			17	17			APBN	DINAS KESEHATAN
5	Katrid tes cepat molekule	Test			17	17			APBN	DINAS KESEHATAN			17	17			APBN	DINAS KESEHATAN
6	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Formulir			17	17			APBN	DINAS KESEHATAN			17	17			APBN	DINAS KESEHATAN

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Metu Layanu Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Metu Layanu Dasar	Realisasi	Anggaran				
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen		17	17	17		APBN	DINAS KESEHATAN						17	17		APBN	DINAS KESEHATAN
8	Tuberkulin	Vial		205	205	205		APBN	DINAS KESEHATAN						205	205		APBN	DINAS KESEHATAN
9	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	Orang		81	81	81		APBN	DINAS KESEHATAN						81	81		APBN	DINAS KESEHATAN
10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang		181	181	181		APBN	DINAS KESEHATAN						181	181		APBN	DINAS KESEHATAN
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang		58	58	58		APBN	DINAS KESEHATAN						58	58		APBN	DINAS KESEHATAN
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang		171	171	171		APBN	DINAS KESEHATAN						171	171		APBN	DINAS KESEHATAN
13	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang		53	53	53		APBN	DINAS KESEHATAN						53	53		APBN	DINAS KESEHATAN
14	Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang		3	3	3		APBN	DINAS KESEHATAN						3	3		APBN	DINAS KESEHATAN
15	Kader Kesehatan	Orang		175	175	175		APBN	DINAS KESEHATAN						175	175		APBN	DINAS KESEHATAN
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficienty Virus)	orang	5288	5288	166,380,000		APBD	DINAS KESEHATAN							5341	168,044,000		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	Media		34	34		APBN	DINAS KESEHATAN							34			APBN	DINAS KESEHATAN

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2025)				Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)				Instansi Pelaksana
			Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	
2	Tes cepat HIV (RDT) pertama	Test		5288	5288		APBN	DINAS KESEHATAN		5341	5341		APBN	DINAS KESEHATAN
3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lencet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vaculainer dan Jarum Sesaui	Paket		5288	5288		APBD	DINAS KESEHATAN		5341	5341		APBN	DINAS KESEHATAN
4	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket		5288	5288		APBN	DINAS KESEHATAN		5341	5341		APBN	DINAS KESEHATAN
5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang		84	84		APBN	DINAS KESEHATAN		84	84		APBN	DINAS KESEHATAN
6	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang		160	160		APBN	DINAS KESEHATAN		160	160		APBN	DINAS KESEHATAN
7	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang		181	181		APBN	DINAS KESEHATAN		181	181		APBN	DINAS KESEHATAN
8	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang		53	53		APBN	DINAS KESEHATAN		53	53		APBN	DINAS KESEHATAN
9	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang		171	171		APBN	DINAS KESEHATAN		171	171		APBN	DINAS KESEHATAN
10	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu; pendamping dan penjangkauan	Orang		17	17		APBN	DINAS KESEHATAN		17	17		APBN	DINAS KESEHATAN

Tabel 3.3
Renaksi Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum Kota Baubau Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Penerima Layanan Dasar Tahun 2023	Pencapaian SPM (2024)					Intisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Orang	1880	1880	1880			7,499,429,000		APBD & APBN	DINAS PUPR
	Jaringan Perpipaan										
1	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	150			470	470	7,499,429,000		APBD & APBN	DINAS PUPR
2	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	150			470	470			APBD & APBN	DINAS PUPR
	Bukan Jaringan Perpipaan										

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Penerima Layanan Dasar Tahun 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	0			0	0	-		APBD & APBN	DINAS PUPR
2	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbisa, tidak berbau	Rumah Tangga	0			0	0	-		APBD & APBN	DINAS PUPR
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Orang	2400	1328	1328			10,943,255,000		APBD & APBN	DINAS PUPR
1	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	600			332	332	5,471,627,000		APBD & APBN	DINAS PUPR
2	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar	Rumah Tangga	300			218	218	3,592,816,000		APBD & APBN	DINAS PUPR

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Penerima Layanan Dasar Tahun 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
	individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T										
3	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septik sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	300			114	114	1,878,812,000		APBD & APBN	DINAS PUPR

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Orang	248	248					APBD & APBN	DINAS PUPR					2,776,385,000		APBD & APBN	DINAS PUPR
	Jaringan Perpipaan																	
1	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga			62	62			APBD & APBN	DINAS PUPR			174	174	2,776,385,000		APBD & APBN	DINAS PUPR
2	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga			62	62			APBD & APBN	DINAS PUPR			174	174	-		APBD & APBN	DINAS PUPR

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
	Bukan Jaringan Perpipaan																	
1	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga			0	0			APBD & APBN	DINAS PUPR			0	0	-		APBD & APBN	DINAS PUPR
2	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga			0	0			APBD & APBN	DINAS PUPR			2760	2760	-		APBD & APBN	DINAS PUPR
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Orang	1068	1068			8,402,000,000		APBD & APBN	DINAS PUPR	1068	1068			16,883,032,000		APBD & APBN	DINAS PUPR

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2025)					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga			267	267	4,201,000,000		APBD & APBN	DINAS PUPR			690	690	8,441,516,000		APBD & APBN	DINAS PUPR
2	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga			0	0	-		APBD & APBN	DINAS PUPR			345	345	3,013,258,000		APBD & APBN	DINAS PUPR
3	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan	Rumah Tangga			267	267	4,201,000,000		APBD & APBN	DINAS PUPR			345	345	5,428,258,000		APBD & APBN	DINAS PUPR

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
	fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar																	

Tabel 3.4
Renaksi Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat Kota Baubau Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Penerima Layanan Dasar Tahun 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	orang	64,135	64,776	0			292,831,200		APBD	DISPERKIMTAN
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)										
1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	1			64,776	0	99,760,000		APBD	DISPERKIMTAN
2	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	0			64,776	0	0		APBD	DISPERKIMTAN
3	Pemukiman kembali bagi korban bencana	Rumah	0			64,776	0	0		APBD	DISPERKIMTAN

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Penerima Layanan Dasar Tahun 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
4	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	0			64,776	0	0		APBD	DISPERKIMTAN
	Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 4A1, 4B6, 4B7, 4C3)										
1	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	jumlah kab/kota	1	64,776	0	64,776	0	0		APBD	DISPERKIMTAN
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	orang	0	64,776	0			0		APBD	DISPERKIMTAN
	a) pengurangan kawasan kumuh di bawah 10 Ha; b) penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; c) pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman; d) pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau e) pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana										
	Ada Relokasi Program Pemerintah										

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Penerima Layanan Dasar Tahun 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan										
	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal);	Rumah	0			64,776	0	0		APBD	DISPERKIMTAN
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat; dan	Rumah	0			64,776	0	0		APBD	DISPERKIMTAN
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Rumah	0			64,776	0	0		APBD	DISPERKIMTAN
2	Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Rumah	0			64,776	0	0		APBD	DISPERKIMTAN
	Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah										
	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	Jumlah kab/kota	1		64,776	0	64,776	0	0	APBD	DISPERKIMTAN

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	orang	65,417	0			292,831,200	0	APBD	DISPERKIMTAN	66,058	0			292,831,200	0	APBD	DISPERKIMTAN
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)																	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah			65,417	0	99,760,000	0	APBD	DISPERKI MTAN			66,058	0	99,760,000	0	APBD	DISPERKI MTAN
2	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah			65,417	0	0	0	APBD	DISPERKI MTAN			66,058	0	0	0	APBD	DISPERKI MTAN
3	Pemukiman kembali bagi korban bencana	Rumah			65,417	0	0	0	APBD	DISPERKI MTAN			66,058	0	0	0	APBD	DISPERKI MTAN
4	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah			65,417	0	0	0	APBD	DISPERKI MTAN			66,058	0	0	0	APBD	DISPERKI MTAN
	Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 4A1, 4B6, 4B7, 4C3)																	
1	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	jumlah kab/kota	65,417	0	65,417	0	0	0	APBD	DISPERKI MTAN	66,058	0	66,058	0	0	0	APBD	DISPERKI MTAN
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	orang	65,417	0			0	0	APBD	DISPERKI MTAN	66,058	0			0	0	APBD	DISPERKI MTAN
	a) pengurangan kawasan kumuh di bawah 10 Ha; b) penyesuaian																	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
	perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; c) pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman; d) pengurangan perumahan yang berada di daerah/ tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau e) pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana																	
	Ada Relokasi Program Pemerintah																	
1	Facilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan																	
	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal);	Rumah			65,417	0	0	0	APBD	DISPERKI MTAN			66,058	0	0	0	APBD	DISPERKI MTAN
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat; dan	Rumah			65,417	0	0	0	APBD	DISPERKI MTAN			66,058	0	0	0	APBD	DISPERKI MTAN
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Rumah			65,417	0	0	0	APBD	DISPERKI MTAN			66,058	0	0	0	APBD	DISPERKI MTAN
2	Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Rumah			65,417	0	0	0	APBD	DISPERKI MTAN			66,058	0	0	0	APBD	DISPERKI MTAN
	Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah																	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	Jumlah kab/kota	65,417	0	65,417	0	0	0	APBD	DISPERKMTAN	66,058	0	66,058	0		APBD	DISPERKMTAN	

Tabel 3.4

Renaksi Penerapan SPM Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Baubau Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Penerima Layanan Dasar Tahun 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	orang	1824	1842	1842			1,469,996,100	802,867,975	APBD	SATPOL PP
1	Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	unit	316			316	316	-		APBD	SATPOL PP

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Penerima Layanan Dasar Tahun 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada* (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	dokumen	10			10	10	-		APBD	SATPOL PP
3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	orang	70			70	70	-		APBD	SATPOL PP
4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan keruglan material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	dokumen	0			0	0	-		APBD	SATPOL PP
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak	orang	0			0	0	-		APBD	SATPOL PP

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Penerima Layanan Dasar Tahun 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
	ringan, rusak sedang, rusak berat)										
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang	0			0	0	-	APBD	SATPOL PP	
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	orang	108950	108950	1702			55,127,000	APBD	BPBD	
1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen	1						APBD	BPBD	
2	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	108950			108950	1702	55,127,000	APBD	BPBD	
3	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang	108950			108950	108950	31,689,000	APBD	BPBD	
4	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit	20			20	20	15,196,000	APBD	BPBD	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Penerima Layanan Dasar Tahun 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	orang	9113	9113	160			175,020,000		APBD	BPBD
1	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	unit	93							APBD	BPBD
2	Peningkatan kapasitas personal/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	orang	160			320	160	175,020,000		APBD	BPBD
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	orang	9	9	9			33,849,000		APBD	BPBD
1	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko	1			1	1	31,680,000		APBD	BPBD
2	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	orang	7			10	10	8,000,000		APBD	BPBD
3	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	dokumen	1			1	1	11,180,000.0		APBD	BPBD
4	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan	1			1	1	11,295,000.0		APBD	BPBD
5	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	6			6	6	11,374,000.0		APBD	BPBD

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Penerima Layanan Dasar Tahun 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	orang		385	385			2,031,036,000		APBD	DAMKAR
1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/fredkar)	layanan				14	14	15,382,000		APBD	DAMKAR
2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen				0	0	-		APBD	DAMKAR
3	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	unit				126	126	1,590,000,000		APBD	DAMKAR
4	Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparaturnya SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam)	orang				22	22	409,642,000		APBD	DAMKAR
5	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan				23	23			APBD	DAMKAR

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Penerima Layanan Dasar Tahun 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan			50	50	16,012,000		APBD	DAMKAR	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	Pelayanan Ketertarikan dan Ketertiban Umum (TRANTRIBUM)	orang	1860	1860			1,763,995,320	1,469,996,100	APBD	SATPOL PP	1878	1878			2,116,794,384	1,763,995,320	APBD	SATPOL PP
1	Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkara (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	unit			316	316	-		APBD	SATPOL PP			316	316	-		APBD	SATPOL PP
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkara* (SOP penegakan Perda, Tibumtranmes, pelaksanaan)	dokumen			10	10	-		APBD	SATPOL PP			10	10	-		APBD	SATPOL PP

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
	penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)																	
3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	orang			70	70	-		APBD	SATPOL PP			70	70	-		APBD	SATPOL PP
4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan	dokumen							APBD	SATPOL PP							APBD	SATPOL PP

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
	pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal																	
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang						APBD	SATPOL PP							APBD	SATPOL PP	
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah saki/ pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang						APBD	SATPOL PP							APBD	SATPOL PP	
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	orang	108950	1850			60,000,000	APBD	BPBD	108950	1950			66,000,000	APBD	BPBD		
1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen						APBD	BPBD			1	1	200,000,000	APBD	BPBD		

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
2	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang			108950	1850	60,000,000		APBD	BPBD			108950	1950	66,000,000		APBD	BPBD
3	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang			109000	109000	34,858,000		APBD	BPBD			109050	109050	35,206,500		APBD	BPBD
4	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit			30	30	30,000,000		APBD	BPBD			40	40	45,000,000		APBD	BPBD
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	orang	9113	180			190,000,000		APBD	BPBD	9113	200			205,000,000		APBD	BPBD
1	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	unit							APBD	BPBD			120	100	230,000,000		APBD	BPBD
2	Peningkatan kapasitas personal/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	orang			320	180	190,000,000		APBD	BPBD			320	200	205,000,000		APBD	BPBD

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	orang	9	9			37,500,000		APBD	BPBD	9	9			42,000,000		APBD	BPBD
1	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko			1	1	35,000,000		APBD	BPBD			1	1	38,500,000		APBD	BPBD
2	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	orang			12	12	10,000,000		APBD	BPBD			15	15	12,000,000		APBD	BPBD
3	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	dokumen			1	1	12,500,000.0		APBD	BPBD			1	1	15,000,000		APBD	BPBD
4	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan			1	1	12,700,000.0		APBD	BPBD			1	1	15,500,000		APBD	BPBD
5	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan			11	11	13,000,000.0		APBD	BPBD			11	11	16,000,000		APBD	BPBD
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	orang	435	435			2,069,642,000		APBD	DAMKAR	490	490			2,099,642,000		APBD	DAMKAR
1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan	layanan			23	23	25,000,000		APBD	DAMKAR			23	23	30,000,000		APBD	DAMKAR

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
	sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)																	
2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen			0	0	-		APBD	DAMKAR			1	1	15,000,000		APBD	DAMKAR
3	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	unit			15	15	1,590,000,000		APBD	DAMKAR			20	20	1,590,000,000		APBD	DAMKAR
4	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	orang			20	20	409,642,000		APBD	DAMKAR			20	20	409,642,000		APBD	DAMKAR
5	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara	layanan			23	23	25,000,000		APBD	DAMKAR			23	23	30,000,000		APBD	DAMKAR

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
	yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)																	
6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan			50	50	20,000,000		APBD	DAMKAR			50	50	25,000,000		APBD	DAMKAR

Tabel 3.6
Renaksi Penerapan SPM Urusan Sosial Kota Baubau Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Penerima Layanan Dasar Tahun 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	orang	300	100	0			417,230,300		APBD	DINAS SOSIAL
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diuskan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	300			100	0	-		APBD	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada penyandang disabilitas terlantar	Orang	300			100	0	-		APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Penerima Layanan Dasar Tahun 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
3	Penyediaan pemakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks pemakanan/orang/hari)	Orang	300			100	0	32,118,000		APBD	DINAS SOSIAL
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian pertengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan . kebutuhan lainnya)	Orang	300			100	0	-		APBD	DINAS SOSIAL
5	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	300			100	0	44,201,400		APBD	DINAS SOSIAL
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	300			100	0	-		APBD	DINAS SOSIAL
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	300			450	450	132,598,900		APBD	DINAS SOSIAL
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat	Orang	300			100	0	77,247,000		APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Penerima Layanan Dasar Tahun 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
	Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)										
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	300			100	0	-		APBD	DINAS SOSIAL
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	300			100	0	-		APBD	DINAS SOSIAL
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	300			100	0	1,581,000		APBD	DINAS SOSIAL
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	300			100	0	10,000,000		APBD	DINAS SOSIAL
13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	40			100	91	119,484,000		APBD	DINAS SOSIAL
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terantar di Luar Pantii Sosial	orang	10	50	50			151,602,000		APBD	DINAS SOSIAL
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terantar untuk diuskan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	10			50	0	-		APBD	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terantar	Orang	10			50	0	-		APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Penerima Layanan Dasar Tahun 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	10			50	0	32,118,000		APBD	DINAS SOSIAL
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	10			50	0	-		APBD	DINAS SOSIAL
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (obal umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	10			50	0	-		APBD	DINAS SOSIAL
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	10			50	0	-		APBD	DINAS SOSIAL
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	10			50	0	-		APBD	DINAS SOSIAL
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	10			51	0	-		APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Penerima Layanan Dasar Tahun 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/dinik/rumah sakit)	Orang	10			52	0	-		APBD	DINAS SOSIAL
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	10			50	0	-		APBD	DINAS SOSIAL
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terantar dengan keluarga yang dapat membenarkan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terindungi)	Orang	10			50	0	-		APBD	DINAS SOSIAL
12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	40			100	91	119,484,000		APBD	DINAS SOSIAL
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terantar di Luar Panti Sosial	orang	126	50	50			-		APBD	DINAS SOSIAL
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	126			50	9	-		APBD	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terantar	Orang	126			50	0	-		APBD	DINAS SOSIAL
3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks	Orang	126			50	0	-		APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Penerima Layanan Dasar Tahun 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
	pemakanan/orang(hari)										
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian pertengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	126			50	0	-		APBD	DINAS SOSIAL
5	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	126			50	0	-		APBD	DINAS SOSIAL
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	126			50	0	-		APBD	DINAS SOSIAL
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	126			50	0	-		APBD	DINAS SOSIAL
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlanjar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlanjar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	126			50	0	-		APBD	DINAS SOSIAL
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	126			10	0	-		APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Penerima Layanan Dasar Tahun 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/kinik/rumah sakit)	Orang	26			40	0	-		APBD	DINAS SOSIAL
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga(pencarian keluarga lanjut usia terlanjar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	126			50	50	-		APBD	DINAS SOSIAL
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlanjar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	126			50	0	-		APBD	DINAS SOSIAL
13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlanjar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	126			10	0	-		APBD	DINAS SOSIAL
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantii Sosial	orang	161	170	170			-		APBD	DINAS SOSIAL
	Ada Gepeng										
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlanjar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	50			50		-		APBD	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	Orang	50			50		-		APBD	DINAS SOSIAL
3	Penyediaan permakanaan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial	Orang	50			50		-		APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Penerima Layanan Dasar Tahun 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
	dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permukiman/orang/hari)										
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	50			50		-	.APBD	DINAS SOSIAL	
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	50			50		-	.APBD	DINAS SOSIAL	
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	50			50		-	.APBD	DINAS SOSIAL	
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	50			50		-	.APBD	DINAS SOSIAL	
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	50			50		-	.APBD	DINAS SOSIAL	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Penerima Layanan Dasar Tahun 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klirik/umah sakit)	Orang	50			50			-	APBD	DINAS SOSIAL
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Orang	50			50			-	APBD	DINAS SOSIAL
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	50			50			-	APBD	DINAS SOSIAL
12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	50			50			-	APBD	DINAS SOSIAL
	Tidak Ada Gepeng (Lampirkan Surat Keterangan TTD KDH dan lakukan Tahapan Penerapan SPM)										
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	orang	2708	2500	2500				165,867,000	APBD	DINAS SOSIAL
	Terjadi Bencana										
1	Penyediaan permakanaan (penyediaan permakanaan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	150			150	141		17,867,000	APBD	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang				100	100		148,000,000	APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Penerima Layanan Dasar Tahun 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, velibed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Unit	220			220	50	-	APBD	DINAS SOSIAL	
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan (menupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang	5			5	5	-	APBD	DINAS SOSIAL	
5	Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang	0			0	0	-	APBD	DINAS SOSIAL	
6	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	Jumlah kab/kota	1			1	0	-	APBD	DINAS SOSIAL	
	Tidak Terjadi Bencana (100% dengan catatan melakukan 3 tahapan)										
	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	Jumlah kab/kota	1			1	1	-	APBD	DINAS SOSIAL	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Pantli Sosial	orang	470	470				565,300,000		APBD	DINAS SOSIAL	470	470			565,300,000		APBD	DINAS SOSIAL
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diisikan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang			470	470		47,000,000		APBD	DINAS SOSIAL			470	470	47,000,000		APBD	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada penyandang disabilitas terlantar	Orang			470	470		47,000,000		APBD	DINAS SOSIAL			470	470	47,000,000		APBD	DINAS SOSIAL
3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan	Orang			470	470		47,000,000		APBD	DINAS SOSIAL			470	470	47,000,000		APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
	dengan indeks pemakanan/orang/ hari)																	
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang			470	470	47,000,000		APBD	DINAS SOSIAL			470	470	47,000,000		APBD	DINAS SOSIAL
5	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang			470	470	47,000,000		APBD	DINAS SOSIAL			470	470	47,000,000		APBD	DINAS SOSIAL
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang			470	470	47,000,000		APBD	DINAS SOSIAL			470	470	47,000,000		APBD	DINAS SOSIAL
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/ou tbound/gym bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial	Orang			470	470	47,000,000		APBD	DINAS SOSIAL			470	470	47,000,000		APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
	(seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)																	
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang			470	470	47,000,000		APBD	DINAS SOSIAL			470	470	47,000,000		APBD	DINAS SOSIAL
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang			471	471	47,100,000		APBD	DINAS SOSIAL			471	471	47,100,000		APBD	DINAS SOSIAL
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitas layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang			472	472	47,200,000		APBD	DINAS SOSIAL			472	472	47,200,000		APBD	DINAS SOSIAL
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang			470	470	47,000,000		APBD	DINAS SOSIAL			470	470	47,000,000		APBD	DINAS SOSIAL
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terdukung)	Orang			470	470	47,000,000		APBD	DINAS SOSIAL			470	470	47,000,000		APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2025)				Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi				Anggaran	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi				Anggaran
13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang			10	10	1,000,000		APBD	DINAS SOSIAL			10	10	1,000,000		APBD	DINAS SOSIAL
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terantar di Luar Panti Sosial	orang	50	50			56,300,000		APBD	DINAS SOSIAL	50	50			56,300,000		APBD	DINAS SOSIAL
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terantar untuk diuskan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang			50	50	5,000,000		APBD	DINAS SOSIAL			50	50	5,000,000		APBD	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terantar	Orang			50	50	5,000,000		APBD	DINAS SOSIAL			50	50	5,000,000		APBD	DINAS SOSIAL
3	Penyediaan pemukiman (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di	Orang			50	50	5,000,000		APBD	DINAS SOSIAL			50	50	5,000,000		APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
	desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks pemukiman/orang/hari)																	
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, bafita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang			50	50	5,000,000		APBD	DINAS SOSIAL			50	50	5,000,000		APBD	DINAS SOSIAL
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang			50	50	5,000,000		APBD	DINAS SOSIAL			50	50	5,000,000		APBD	DINAS SOSIAL
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/ou tbound/ gym bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang			50	50	5,000,000		APBD	DINAS SOSIAL			50	50	5,000,000		APBD	DINAS SOSIAL
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terantar serta masyarakat dilakukan	Orang			50	50	5,000,000		APBD	DINAS SOSIAL			50	50	5,000,000		APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
	oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)																	
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang			51	51	5,100,000		APBD	DINAS SOSIAL			51	51	5,100,000		APBD	DINAS SOSIAL
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinih rumah sakit)	Orang			52	62	5,200,000		APBD	DINAS SOSIAL			52	52	5,200,000		APBD	DINAS SOSIAL
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak tertantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang			50	50	5,000,000		APBD	DINAS SOSIAL			50	50	5,000,000		APBD	DINAS SOSIAL
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak tertantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terdukung)	Orang			50	50	5,000,000		APBD	DINAS SOSIAL			50	50	5,000,000		APBD	DINAS SOSIAL
12	Layanan rujukan (layanan yang dibenarkan kepada anak tertantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang			10	10	1,000,000		APBD	DINAS SOSIAL			10	10	1,000,000		APBD	DINAS SOSIAL
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Tertantar di Luar Panti Sosial	orang	50	50			56,000,000		APBD	DINAS SOSIAL	50	50			56,000,000		APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terantar untuk diuskan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTRKS) layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang			50	50	5,000,000		APBD	DINAS SOSIAL			50	50	5,000,000		APBD	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terantar	Orang			50	50	5,000,000		APBD	DINAS SOSIAL			50	50	5,000,000		APBD	DINAS SOSIAL
3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/keurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang			50	50	5,000,000		APBD	DINAS SOSIAL			50	50	5,000,000		APBD	DINAS SOSIAL
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden,	Orang			50	50	5,000,000		APBD	DINAS SOSIAL			50	50	5,000,000		APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
	pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)																	
5	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksa & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang			50	50	5,000,000		APBD	DINAS SOSIAL			50	50	5,000,000		APBD	DINAS SOSIAL
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang			50	50	5,000,000		APBD	DINAS SOSIAL			50	50	5,000,000		APBD	DINAS SOSIAL
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/obound/gym bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang			50	50	5,000,000		APBD	DINAS SOSIAL			50	50	5,000,000		APBD	DINAS SOSIAL
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia tertantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia tertantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan	Orang			50	50	5,000,000		APBD	DINAS SOSIAL			50	50	5,000,000		APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
	difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desakelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat]																	
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang			10	10	1,000,000		APBD	DINAS SOSIAL			10	10	1,000,000		APBD	DINAS SOSIAL
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/ klinik/ rumah sakit)	Orang			40	40	4,000,000		APBD	DINAS SOSIAL			40	40	4,000,000		APBD	DINAS SOSIAL
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terfatar untuk tujuan reunifikasi)	Orang			50	50	5,000,000		APBD	DINAS SOSIAL			50	50	5,000,000		APBD	DINAS SOSIAL
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terfatar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang			50	50	5,000,000		APBD	DINAS SOSIAL			50	50	5,000,000		APBD	DINAS SOSIAL
13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terfatar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang			10	10	1,000,000		APBD	DINAS SOSIAL			10	10	1,000,000		APBD	DINAS SOSIAL
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Partisipasi Sosial	orang	170	170			202,000,000		APBD	DINAS SOSIAL	170	170			202,000,000		APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator	Kategori / Jenis Layanan SPM	Ada Gampang	Satuan	Penerimaan Dasar	Realisasi	Pencapaian SPM (2025)			Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)			Instansi ?	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
							Anggaran	Realisasi	Realisasi				Anggaran	Realisasi	Realisasi			
1				Orang			17.000,000	170	170		APBD	DINAS SOSIAL				APBD	DINAS SOSIAL	
2				Orang			17.000,000	170	170		APBD	DINAS SOSIAL				APBD	DINAS SOSIAL	
3				Orang			17.000,000	170	170		APBD	DINAS SOSIAL				APBD	DINAS SOSIAL	
4				Orang			17.000,000	170	170		APBD	DINAS SOSIAL				APBD	DINAS SOSIAL	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2025)				Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi				Anggaran	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi			
	perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)																
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang			170	170	17,000,000		APBD	DINAS SOSIAL			170	170	17,000,000	APBD	DINAS SOSIAL
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahragawan/fitness/bound/gym bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang			170	170	17,000,000		APBD	DINAS SOSIAL			170	170	17,000,000	APBD	DINAS SOSIAL
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di	Orang			170	170	17,000,000		APBD	DINAS SOSIAL			170	170	17,000,000	APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
	lingkungan keluarga/masyarakat)																	
8	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang			170	170	17,000,000		APBD	DINAS SOSIAL			170	170	17,000,000		APBD	DINAS SOSIAL
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitas layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/ klinik/ rumah sakit)	Orang			150	150	15,000,000		APBD	DINAS SOSIAL			150	150	15,000,000		APBD	DINAS SOSIAL
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Orang			170	170	17,000,000		APBD	DINAS SOSIAL			170	170	17,000,000		APBD	DINAS SOSIAL
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terindung)	Orang			170	170	17,000,000		APBD	DINAS SOSIAL			170	170	17,000,000		APBD	DINAS SOSIAL
12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang			170	170	17,000,000		APBD	DINAS SOSIAL			170	170	17,000,000		APBD	DINAS SOSIAL
	Tidak Ada Gepeng (Lampirkan Surat Keterangan TTD KDH dan lakukan Tahapan Penerapan SPM																	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layannn Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layannn Dasar	Realisasi	Anggaran			
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggapan Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	orang	2500	2500			620,200,000		APBD	DINAS SOSIAL	2500	2500			620,200,000		APBD	DINAS SOSIAL
	Terjadi Bencana																	
1	Penyediaan pemakanan (penyediaan pemakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang			2500	2500	250,000,000		APBD	DINAS SOSIAL			2500	2500	250,000,000		APBD	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kanvas dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang			2500	2500	250,000,000		APBD	DINAS SOSIAL			2500	2500	250,000,000		APBD	DINAS SOSIAL
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Unit			2	2	200,000		APBD	DINAS SOSIAL			2	2	200,000		APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang			1000	1000	100,000,000		APBD	DINAS SOSIAL			1000	1000	100,000,000		APBD	DINAS SOSIAL
5	Pelayanan dukungan Psikososial (upaya dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas atau diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang			50	50	5,000,000		APBD	DINAS SOSIAL			50	50	5,000,000		APBD	DINAS SOSIAL
6	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	Jumlah kab/kota			50	50	5,000,000		APBD	DINAS SOSIAL			50	50	5,000,000		APBD	DINAS SOSIAL
	Tidak Terjadi Bencana (100% dengan catatan melakukan 3 tahapan)																	
	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	Jumlah kab/kota			1	1	10,000,000		APBD	DINAS SOSIAL			1	1	10,000,000		APBD	DINAS SOSIAL

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 18 mengamanatkan bahwa Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA PD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA PD dan RKA PD. Sistematis ini dimaksud antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan. Untuk itu, Rencana Aksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Rencana Aksi Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dalam proses perencanaan berikutnya melalui :

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan :
 - a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah.
 - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.

- c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
 - d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan :
- a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
 - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan :

- a. Gambaran layanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Integrasi Rencana Aksi Penerapan SPM ke dalam Penganggaran Daerah Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD,

RENJA) dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKAPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrument rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:

- a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA PD sebelum disepakati dengan DPRD.
- c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
PENERAPAN SPM

4.1 Pemantauan dan Evaluasi SPM

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara reguler berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada waktu perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.

2. Pelaksanaan Kegiatan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
3. Penggunaan Sumber Daya, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
4. Penyampaian Perkembangan Hasil, pemantuan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.
5. Pelaku Kegiatan, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu :

- a. Ketaatan/*compliance*, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Pemeriksaan/*auditing*, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- c. Laporan/*accounting*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
- d. Penjelasan/*explanation*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap *output*. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kota Baubau, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di *crosscheck* apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

- a. Kebijakan Daerah. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:
 - 1) Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
 - 2) Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
 - 3) Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemerintah daerah bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
 - 4) Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
 - a) Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
 - b) Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
 - c) Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar diberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
 - d) Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?

b. Koordinasi. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:

- 1) Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
- 2) Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
- 3) Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- 4) Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- 5) Bagaimana hubungan Pemerintah Daerah dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

c. Manajemen Kerja. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:

- 1) Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- 2) Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
- 3) Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?

d. Pendanaan. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:

- 1) Apakah Pemerintah Daerah memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?

- 2) Bagaimana Pemerintah Daerah menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
- 3) Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara paripabel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layananannya? Sebaliknya, ataukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
- 4) Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? dan mengapa?
- 5) Apakah ada sumber dana non pemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
- 6) Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang dimanfaatkan, serta berimbang pada berapa banyak warga yang terlayani?
- 7) Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga non pemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

Tabel 4.1 Evaluasi pencapaian indikator SPM

No	Jenis Layanan Dasar	Mutu Layanan	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, *stakeholder* terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

4.2 Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

- a. **Indeks Pencapaian SPM.** Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 - 1) Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
 - 2) Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan; dan
 - 3) SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- b. **Anggaran SPM.** Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 - 1) Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?
 - 2) Bagaimana SPM diposisikan?

- 3) Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?
 - 4) Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target *output* pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?
 - 5) Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?
- c. **Permasalahan SPM.** Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
- 1) Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
 - 2) Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM?
 - 3) Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Capaian pada tiap bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar pada SPM di lingkungan Pemerintah Kota Baubau masih rendah yang diakibatkan kurang memahaminya Perangkat Daerah terkait penerapan SPM Daerah terhadap pemenuhan pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat. Rencana aksi penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM selama 5 tahun ke depan.

5.2 Saran

1. Perlunya penguatan tim penerapan SPM Kota Baubau berkaitan dengan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.
2. Tim penerapan SPM Kota Baubau secepatnya mengoordinasikan rencana aksi daerah yang diprakarsai oleh bagian pemerintahan, guna pemenuhan SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran.
3. Perlunya bimbingan kepada tim penerapan SPM Kota Baubau dalam penyusunan pelaporan SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, pelaporan secara triwulanan yang di laporkan ke dalam Aplikasi e-SPM yaitu: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/pemda/home/login>.
4. Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui Kerjasama *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Rencana Aksi Penerapan SPM ini dibuat, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan Indeks pencapaian SPM di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau

pada tanggal,

2024

PJ. WALI KOTA BAUBAU

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by several vertical strokes, representing the name Muh Rasmán Manafi.

MUH RASMAN MANAFI